



Data & Informasi

MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG



PUSAT DATA DAN INFORMASI

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung



Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia
dengan Universitas Lampung
Jakarta, 2018

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung/
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi, 2018.

+ hlm ; 14,5 x 21 cm
ISBN 978-623-7129-39-4

Judul:

Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi

Penyusun:

Dr. Hartoyo, M.Si
Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
Dr. Ir. Sumaryo Gs., M.Si.
Hartono, S.Sos., MA
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan S.IP, M.A
Widiarti, S.Si., M.Si.
Dr. Abdul Mutolib, S.P

Copyrights © 2018

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama antara
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Tranmigrasi Republik Indonesia dengan
Universitas Lampung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	9
KATA PENGANTAR	12
KATA SAMBUTAN	14
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang	17
1.2. Kerangka Pikir	22
1.3. Maksud, Tujuan, dan Hasil	24
1.4. Penerima Manfaat	25
BAB II PERKEMBANGAN STATUS DESA	26
2.1. Status Perkembangan Desa	26
2.1.1. Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan IDM 2015 dan 2018	26
2.1.2. Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mesuji Berdasarkan IDM 2015 dan 2018	28
2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa	30
2.2.1. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Lampung	30

2.2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Mesuji	34
BAB III PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA	41
3.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa	41
3.1.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Muara Tenang	41
3.1.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Bangun Jaya	47
3.1.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Wira Bangun	50
3.1.4. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Pangkal Mas Jaya	55
.. 3.1.5. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Sidang Muara Jaya	60
3.2. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi	63
3.2.1. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Desa Muara Tenang	63

3.2.2.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Desa Bangun Jaya	64
3.2.3.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Desa Wira Bangun	65
3.2.4.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Desa Pangkal Mas Jaya	68
3.2.5.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Desa Sidang Muara Jaya.	69
3.3	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial	70
3.3.1.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Muara Tenang	70
3.3.2.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Bangun Jaya	71
3.3.3.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Wira Bangun	72
3.3.4.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Pangkal Mas Jaya	75
3.3.5.	Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Sidang Muara Jaya	76

3.4. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	77
3.4.1. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Tenang	77
3.4.2. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Bangun Jaya	78
3.4.3. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Wira Bangun	79
3.4.4. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pangkal Mas Jaya	80
3.4.5. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidang Muara Jaya	80
BAB IV INOVASI DESA	108
4.1. Inovasi Desa Yang Dijalankan	108
4.2. Kebutuhan Inovasi Desa	138
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	149
5.1. Kesimpulan	149
5.2. Rekomendasi	150
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung Menurut IDM tahun 2015	27
Tabel 2.2.	Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung Menurut IDM tahun 2018	27
Tabel 2.3.	Manfaat Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2015	31
Tabel 2.4.	Manfaat Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2016	31
Tabel 2.5.	Manfaat Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2017	32
Tabel 2.6.	Manfaat Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2018.	33
Tabel 2.7.	Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2015	35
Tabel 2.8.	Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2016	35
Tabel 2.9.	Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2017	35

Tabel 210.	Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2018	36
Tabel 3.1.	Pendapatan Desa Muara Tenang Tahun 2015-2018	42
Tabel 3.2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Tenang Tahun 2015-2018	44
Tabel 3.3.	Pendapatan Desa Bangun Jaya Tahun 2015-2018	47
Tabel 3.4.	Pendapatan Desa Wira Bangun Tahun 2015-2018	51
Tabel 3.5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wira Bangun Tahun 2015-2018	54
Tabel 3.6.	Pendapatan Desa Pangkal Mas Jaya Tahun 2015-2018	56
Tabel 3.7.	APBDes Desa Pangkal Mas Jaya Tahun 2015-2018.	58
Tabel 3.8.	APBDes Desa Sidang Muara Jaya Tahun 2015-2018	68
Tabel 3.9.	Pengembangan Ekonomi Desa Bangun Jaya.	93
Tabel 3.10.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Bangun Jaya	94
Tabel 3.11.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Pangkal Mas Jaya.	97
Tabel 3.12.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Pangkal Mas Jaya	98

Tabel 3.13.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Sidang Muara Jaya	100
Tabel 3.14.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Sidang Muara Jaya	102
Tabel 3.15.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Wira Bangun	106
Tabel 3.16.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Wira Bangun	107
Tabel 4.1.	Aparatur Pemerintah Desa Muara Tenang	120
Tabel 4.2.	Aparatur Pemerintah Desa Bangun Jaya	122
Tabel 4.3.	Aparatur Pemerintah Desa Wira Bangun	123
Tabel 4.4.	Aparatur Pemerintah Desa Pangkal Mas Jaya	125
Tabel 4.5.	Aparatur Pemerintah Desa Sidang Muara Jaya	126

KATA PENGANTAR

Perubahan positif suatu desa sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan dilaksanakan dan penunjang yang diperlukan terpenuhi untuk membangun desa. Program dan kegiatan harus disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Untuk mendukung terlaksananya program pembangunan desa tersebut diperlukan dana, yang antara lain dalam bentuk dana desa (DD).

Dimulai tahun 2015, setiap tahun Pemerintah telah memberikan dana desa kepada setiap desa di Indonesia, termasuk semua desa di wilayah Provinsi Lampung. Manfaat yang diperoleh bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa dari alokasi dana desa yang sudah diberikan tersebut belum diketahui secara pasti. Untuk mendapatkan data dan informasi yang rinci terhadap manfaat dana desa tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan data dan informasi tentang manfaat dana desa di Provinsi Lampung.

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data survei dan wawancara mendalam yang didukung data-data

dokumen. Data dikumpulkan dari lima desa sampel pada empat kecamatan di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Data primer dan sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif-kuantitatif dan kualitatif dan dianalisis berdasarkan sajian data-data tersebut.

Atas nama Universitas Lampung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Transmigrasi RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Unila untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga saran dan masukan dari semua pihak tetap kami terima dengan tangan terbuka.

B. Lampung, Desember 2018
Ketua Tim Pelaksana,

Dr. Hartoyo, M.Si.

KATA SAMBUTAN

Pada kesempatan yang baik ini saya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian tentang Penyusunan Data dan Informasi tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung, dengan menfokuskan pada wilayah Kabupaten Mesuji.

Kami menyadari bahwa pekerjaan ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Kepada Bapak Khamami, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, juga kami ucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan fasilitas secara maksimal dan sungguh-sungguh membantu terselenggaranya penelitian ini, termasuk kelancaran pengumpulan data lapangan. Semoga Kabupaten

Mesuji pada masa-masa yang akan datang semakin baik lagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bandar Lampung, Desember 2018

Ketua LPPM Universitas Lampung

Warsono, Ph.D

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Mesuji merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Tulang Bawang dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 km² (BPS Tulang Bawang 2009). Berdasarkan angka tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 10% per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.084.644 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 jiwa/km² (BPS Tulang Bawang, 2011). Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan derasnya arus reformasi yang sedang berlangsung dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, telah mendorong timbulnya aspirasi dan keinginan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang, yaitu wilayah Mesuji untuk membentuk pemerintahan sendiri, terpisah dari pemerintahan Tulang Bawang yang didasarkan kepada terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan, terutama ke wilayah sekitar bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu potensi sumber daya alam yang cukup luas dan sebagai salah satu daerah sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan sumber bahan pangan dan bahan baku agroindustri di Lampung dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan di daerah tersebut. Keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi pemerintah pusat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sebelum dimekarkan, Kabupaten Mesuji memang sangat minim sekali akan sarana dan prasarana, hal ini terjadi karena Kabupaten Tulang Bawang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana sangat belum optimal. Hambatan dalam pemerataan biasanya dipengaruhi oleh keterbatasan dana pemerintah

serta terlalu luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sarana-sarana pendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji masih sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Salah satu kendala adalah infrastruktur yang kurang memadai, terutama jalan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah sehingga sewaktu hujan, aktivitas ekonomi sedikit tersendat karena jalan sulit untuk dilalui, baik untuk berjalan kaki maupun dengan kendaraan.

Kabupaten Mesuji tergolong sebagai daerah tertinggal yang disebabkan karena pembangunan hanya menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana secara optimal. Selain itu, pembangunan secara sektoral yang terpusat kurang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi daerah sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Wilayah Mesuji memiliki sumber daya alam yang memadai namun pengolahan sumber daya tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten Mesuji akhirnya resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang secara yuridis berdiri sejak tanggal 26 November 2008, pada saat Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten

Mesuji, Provinsi Lampung tersebut disahkan. Pembentukan Kabupaten Mesuji ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang, memperpendek rentang kendali, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis administratif memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu Daerah Otonomi Baru. Berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat maka ditetapkan Kampung Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji sebagai ibukota Kabupaten Mesuji.

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Mesuji menghadapi beberapa kendala utama dalam pembangunan, salah satunya adalah keterbatasan akses jalan ke beberapa wilayah dan akses internet yang terbatas hanya di beberapa wilayah tertentu. Selain akses, Kabupaten Mesuji merupakan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan salah satu kabupaten di Lampung dengan sejarah konflik berkepanjangan. Konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji erat kaitannya dengan permasalahan agraria, baik dengan pemerintah dan antar-masyarakat (Wahab, 2013). Konflik di Mesuji semakin tajam karena diikuti dengan isu kepentingan suku, sehingga konflik dengan mudah tersulut dan membesar. Meskipun menghadapi banyak permasalahan, Kabupaten Mesuji tetap terus membangun dan berkembang, terbukti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang menetapkan 122 daerah tertinggal, Kabupaten Mesuji tidak masuk di dalamnya. Di Provinsi Lampung, kabupaten yan

dikategorikan tertinggal adalah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan keterjangkauan pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar adalah melalui kebijakan dana desa. Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*, dengan semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa-lah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya tentu memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan (Nasar, 2016).

Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Undang-Undang tersebut memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan dana desa. Dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Menurut Chasanah, Rosyadi, Kurniasih (2017), dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kerangka Pikir

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan.

Kewajiban pada tataran kebijakan sebagaimana RPJMN 2015-2019, tertuang kategori tingkat perkembangan desa, maka dipilih Indeks Desa Membangun (IDM) yang berisi 5 kategori, yaitu 1) Sangat Tertinggal, 2) Tertinggal, 3) Berkembang, 4) Maju, dan 5) Mandiri.

Pada kondisi sekarang, adalah: 1) minimnya data dan informasi tentang manfaat dana desa di Provinsi Lampung, bahkan tingkat nasional terhadap peningkatan IDM, rasio gini, dan penanggulangan kemiskinan; dan 2) minimnya data dan informasi tentang keterkaitan antara manfaat dana desa dengan inovasi desa di Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan IDM dan SDGs.

Berdasarkan pada kondisi ini maka: 1) diperlukan data dan informasi tentang manfaat dana desa di Provinsi Lampung dengan inovasi desa; dan 2) diperlukan data dan informasi tentang manfaat dana desa terhadap peningkatan IDM desa, rasio gini dan penanggulangan kemiskinan. Solusinya adalah perlu dilakukan penyusunan data dan informasi tentang manfaat dana desa terhadap peningkatan IDM desa, rasio gini, dan penanggulangan kemiskinan serta inovasi desa, khususnya di Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan solusi tersebut diperlukan sumber daya dan kegiatan. Sumber daya berupa manusia, mesin dan peralatan serta bahan. Selain itu diperlukan material: *technoware*, sistem informasi, *humanware*, SDM, *hardware*, *computer supply*. Inovasi berupa pengetahuan, data, informasi. Organisasi: yang ditunjuk adalah perguruan tinggi berdasarkan

arahan dari Kemendesa PDTT. Tidak kalah pentingnya diperlukan dukungan metode pelaksanaan, yakni: swakelola tipe II, kontraktual, pengumpulan dan analisis data dan informasi, beragam *event* dan *workshop*; sedangkan pada aspek kegiatan perlu dilakukan kegiatan penyusunan data dan informasi tentang manfaat dana desa.

Hasilnya, pertama, tersedianya data dan informasi untuk mendukung penyelesaian Target RPJMN dan SDGs dan indeks rasio gini. Kedua, tersedianya data dan informasi dan stimulan informasi untuk memfasilitasi desa dalam pemanfaatan produk inovasi melalui jasa layanan data dan informasi dan stimulan informasi. Ketiga, penyediaan data dan informasi serta stimulan data untuk meningkatkan kualitas *policy decision*.

1.3.Maksud, Tujuan, dan Hasil

1. Menganalisis data dan informasi dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM);
2. Menganalisis data dan Informasi pemanfaatan dana desa terkait dengan status perkembangan desa, peningkatan kesejahteraan, dan lembaga ekonomi desa;
3. Menganalisis data inovasi desa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dana desa;
4. Menyusun rekomendasi penggunaan inovasi pembangunan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa.

1.4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan KDPDTI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Provinsi Lampung, serta masyarakat luas.

BAB II

PERKEMBANGAN STATUS DESA

2.1. Status Perkembangan Desa

2.1.1. Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan IDM 2015 dan 2018

Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang memiliki 2.435 desa. Adapun kategori status perkembangan desa menurut IDM tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Kategori Status Perkembangan Desa Menurut Kabupaten di Provinsi
Lampung Menurut IDM Tahun 2015

No	Kabupaten	1	2	3	4	5
1	Lampung Barat	26	72	32	1	0
2	Lampung Selatan	2	98	139	16	1
3	Lampung Tengah	3	126	154	11	0
4	Lampung Timur	2	128	119	14	0
5	Lampung Utara	21	163	46	2	0
6	Mesuji	9	68	27	1	0
7	Pesawaran	10	73	61	0	0
8	Pesisir Barat	8	70	38	0	0
9	Pringsewu	1	58	63	4	0
10	Tanggamus	44	177	74	4	0

11	Tulang Bawang Barat	2	61	29	1	0
12	Tulang Bawang	17	92	37	1	0
13	Way Kanan	6	116	93	2	0
Jumlah		151	1302	912	57	1

Keterangan:

1.Sangat Tertinggal; 2. Tertinggal; 3. Berkembang; 4. Maju; 5. Mandiri

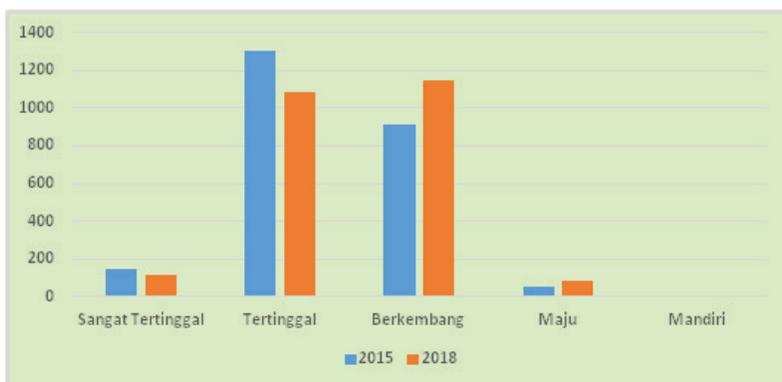
Kategori status perkembangan desa menurut IDM tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung
Menurut IDM Tahun 2018

No.	Kabupaten	1	2	3	4	5
1	Lampung Barat	10	61	58	2	0
2	Lampung Selatan	6	81	147	20	2
3	Lampung Tengah	1	100	177	23	0
4	Lampung Timur	1	96	159	8	0
5	Lampung Utara	6	155	69	2	0
6	Mesuji	9	34	57	5	0
7	Pesawaran	0	53	83	7	1
8	Pesisir Barat	9	79	26	1	1
9	Pringsewu	3	49	67	6	1
10	Tanggamus	37	174	81	7	0
11	Tulang Bawang	16	73	56	1	1
12	Tulang Bawang Barat	1	30	60	2	0
13	Way Kanan	14	101	104	2	0
Jumlah		113	1086	1144	86	6

Keterangan:

1.Sangat Tertinggal; 2. Tertinggal; 3. Berkembang; 4. Maju; 5. Mandiri

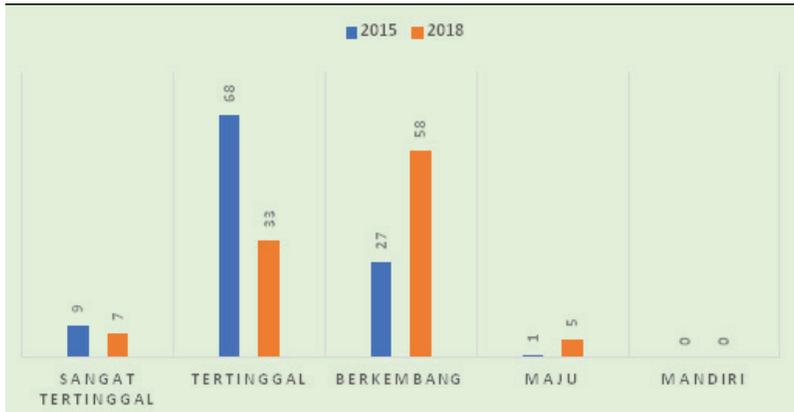


Gambar 2.1.
Kategori Status Perkembangan Desa Provinsi Lampung Menurut IDM
Tahun 2015 dan 2018

Dilihat pada skala wilayah provinsi, data pada Tabel 2.1. dan 2.2. yang didukung data pada Gambar 2.1., semua menunjukkan perkembangan status desa pada semua kategori status desa-desa di Provinsi Lampung, mulai dari status sangat tertinggal sampai dengan desa mandiri. Tetapi, perkembangan status desa masih terkonsentrasi pada desa berkembang.

2.1.2. Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mesuji berdasarkan IDM 2015 dan 2018

Terdapat sedikit perkembangan desa sebesar 0,0003 di Kabupaten Mesuji berdasarkan rerata IDM 2015 sebesar 0,5978 dibandingkan dengan rerata IDM 2018 sebesar 0,5981.



ar 2.2.

Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mesuji Berdasarkan IDM Tahun 2015 dan 2018

Perkembangan status desa pada desa-desa di Kabupaten Mesuji tidak jauh berbeda dengan perkembangan desa di Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Terdapat penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dari 9 desa pada tahun 2015 menjadi 7 pada tahun 2018. Demikian juga desa tertinggal, terdapat penurunan dari 68 desa pada tahun 2015 menjadi 33 desa pada tahun 2018. Terdapat 27 desa berkembang pada tahun 2015 menjadi sebanyak 58 desa pada tahun 2018. Terakhir, terdapat 1 desa berstatus mandiri pada tahun 2015 menjadi 5 desa pada tahun 2018. Tetapi, di Kabupaten Mesuji belum ada desa yang berstatus sebagai desa mandiri.

Jadi, status perkembangan desa di Kabupaten Mesuji tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada skala Provinsi

Lampung. Status perkembangan desa masih terkonsentrasi pada desa berkembang dan desa tertinggal. Sentuhan dana desa memang tidak dimungkiri bermanfaat bagi perkembangan pembangunan desa, meskipun masih bersifat dasar, seperti baru taraf memperbaiki infrastruktur, yang memang sangat diperlukan sebagai dasar pemacu perkembangan suatu desa.

2.2.Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa

2.2.1.Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Lampung

Data pada Tabel 2.4. - 2.6. tentang pemanfaatan dana desa Provinsi Lampung tahun 2015-2018 menunjukkan skala prioritas yang berbeda pada tiap tahunnya. Namun demikian, secara umum terjadi kesamaan bahwa pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa menjadi program prioritas. Pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan pelayanan publik dianggap yang paling penting untuk diutamakan dibanding pembangunan lainnya, apalagi yang non-fisik.

Sebanyak 2435 desa yang tersebar di 203 kecamatan dan 13 kabupaten se-Provinsi Lampung mendapat alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp1,9 triliun. Dana ini dikucurkan dengan memegang prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif swakelola berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa.

Tabel 2.3.
Pemanfaatan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2015

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	91.793.641.606	13,44
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	466.297.865.593	68,25
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	39.912.392.390	5,84
4.	Pemberdayaan Masyarakat	85.166.942.135	12,47
Total		683.170.841.724	100,00

Data pada Tabel 2.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak Rp683 miliar lebih dana telah dikucurkan ke desa-desa untuk melakukan pembangunan di empat bidang kegiatan utama. Kemudian pada tahun 2016, dana desa ditingkatkan sebanyak 24 persen lebih menjadi Rp902 miliar lebih untuk melakukan pembangunan pada tujuh bidang kegiatan. Jadi, peningkatan jumlah dana yang dikucurkan ke desa-desa sejalan dengan skala prioritas yang pada tahun 2015 ada 4 bidang, sedangkan pada tahun 2017 ditambah menjadi 7 bidang. Artinya, terdapat perluasan lingkup atau bidang pembangunan desa yang harus dilakukan agar berkembang desanya dan meningkat kesejahteraan warga masyarakatnya.

Tabel 2.4.
Pemanfaatan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2016

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	53220800726525	5,897
2.	Sarana Prasarana Desa	11094568358141	1,229
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	10340621827	0,001
4.	Pemanfaatan SDA dan Ling Berkelanjutan	17603966	0,00

5.	Pemberdayaan Masyarakat	106639074275436	11,82
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	120203055319352	13,32
7.	Pembinaan Kemasyarakatan	611343694433578	67,74
Total		902.511.551.338.825	100,00

Data pada Tabel 2.5. menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah dana desa pada tahun 2017 menjadi Rp1,3 triliun lebih, yang dimanfaatkan dalam tujuh bidang kegiatan utama. Dalam memanfaatkan dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 masih terkonsentrasi pada pembangunan sarana dan prasarana desa. Bidang pemberdayaan menjadi skala prioritas kedua dan jumlah dana yang dialokasikan pada bidang pembangunan juga meningkat.

Tabel 2.5.
Pemanfaatan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2017

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	37.542.834.145	2,81
2.	Sarana Prasarana Desa	1.135.882.562.516	84,9
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	2.167.705.249	0,16
4.	Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan	1.429.580.113	0,11
5.	Pemberdayaan Masyarakat	104.666.280.361	7,82
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	29.232.155.211	2,19
7.	Pembinaan Kemasyarakatan	26.934.016.249	2,01
Total		1.337.855.133.844	100,00

Data pada Tabel 2.6. menunjukkan bahwa dana desa ditambah menjadi Rp1,2 triliun lebih yang dimanfaatkan untuk

delapan bidang pembangunan desa. Sarana dan prasarana desa tetap menjadi bidang prioritas, termasuk di dalamnya bidang sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, dan bidang pemberdayaan masyarakat tetap mendapatkan dana yang besar.

Tabel 2.6.
Pemanfaatan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2018

1.	Sarana-Prasarana Desa	807.664.530.006	64,63
2.	Sarana-Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	193.626.999.820	15,49
3.	Sarana-Prasarana Ekonomi	6.374.053.142	0,51
4.	Sarana-Prasarana Lingkungan	1.050.358.856	0,08
5.	Sarana-Prasarana lainnya	12.517.177.782	1,00
6.	Pemberdayaan Masyarakat	150.214.513.239	12,02
7.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.219.275.934	3,54
8.	Pembinaan Masyarakat	34.036.237.745	2,72
Total		1.249.703.146.524	
Realisasi per November 2018		68%	

Dilihat dari meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun yang dialokasikan untuk pembangunan di desa meskipun terdapat perkembangan status desa yang masih lambat. Harapan kita ke depan dengan asumsi tidak ada faktor penghambat yang berarti maka pada tahun-tahun mendatang akan kelihatan dampaknya bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Mesuji

Pemkab Mesuji melalui APBD Kabupaten Mesuji menjalankan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu). Pada 2018 ini Pemkab mengalokasikan dana sekitar Rp24 miliar, dengan dua macam bantuan, yakni bantuan “Rumah Kita” bagi orang tua jompo sebesar Rp32 juta dan bantuan stimulan bagi “Rumah Tangga Sasaran” yang memiliki material sebesar Rp15 juta.

Selain itu, Pemkab Mesuji melalui alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mesuji membangun “Rumah Desa”. Rumah yang dibangun diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu dan tidak memiliki tanah tempat tinggal, serta minimal telah bermukim selama lima tahun di desa itu. Kabupaten Mesuji meskipun dengan jumlah APBD yang terkecil di Provinsi Lampung, yakni sebesar Rp886 miliar, dikelola dengan baik secara efektif dan efisien melalui program-program inovatif yang sangat berpihak pada masyarakat.

Tabel 2.7.
Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2015

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	91.793.641.606	13,44
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	466.297.865.593	68,25
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	39.912.392.390	5,84
4.	Pemberdayaan Masyarakat	85.166.942.135	12,47
TOTAL		683.170.841.724	

Tabel 2.8.
Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2016

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	53220800726525	5,897
2.	Sarana-Prasarana Desa	11094568358141	1,229
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	10340621827	0,001
4.	Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan	17603966	0,00000195
5.	Pemberdayaan Masyarakat	106639074275436	11,82
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	120203055319352	13,32
7.	Pembinaan Kemasyarakatan	611343694433578	67,74
TOTAL		902.511.551.338.825	

Tabel 2.9.
Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2017

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	37.542.834.145	2,81
2.	Sarana-Prasarana Desa	1.135.882.562.516	84,9
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	2.167.705.249	0,16
4.	Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan	1.429.580.113	0,11
5.	Pemberdayaan Masyarakat	104.666.280.361	7,82
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	29.232.155.211	2,19

7.	Pembinaan Kemasyarakatan	26.934.016.249	2,01
TOTAL		1.337.855.133.844	

Relatif sama dengan yang terjadi di tingkat provinsi, bahwa pemanfaatan dana desa pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Mesuji lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dibandingkan dengan non-fisik. Tetapi, gejala lain juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Dampaknya bagi perkembangan status desa cukup terlihat, yakni terdapat penurunan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Kemudian terjadi peningkatan jumlah desa berkembang dan desa maju, meskipun masih belum ada desa mandiri.

Tabel 2.10.
Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun 2018

1.	Sarana-Prasarana Desa	807.664.530.006	64,63
2.	Sarana-Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	193.626.999.820	15,49
3.	Sarana-Prasarana Ekonomi	6.374.053.142	0,51
4.	Sarana-Prasarana Lingkungan	1.050.358.856	0,08
5.	Sarana-Prasarana lainnya	12.517.177.782	1,00
6.	Pemberdayaan Masyarakat	150.214.513.239	12,02
7.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.219.275.934	3,54
8.	Pembinaan Masyarakat	34.036.237.745	2,72
TOTAL		1.249.703.146.524	
Realisasi per November 2018		68%	

Hingga pada tahun 2018, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana masih paling besar dibandingkan dengan aspek lain.



Sumber: Data tahun 2015 diambil dari Permendesa PDTT No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; sedangkan data tahun 2018 SK Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 52 Tahun 2018

Gambar 2.3.
Status Perkembangan Desa di Indonesia Menurut IDM Tahun 2015 dan 2018

Dari Gambar 2.3. diketahui bahwa jumlah desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri mengalami peningkatan, sedangkan jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal mengalami penurunan. Perubahan yang positif terjadi karena jumlah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, sedangkan desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada desa dengan status berkembang yang mencapai 12,2 persen, dan peningkatan terendah pada desa dengan status

mandiri yang hanya 0,09 persen. Kemajuan desa di antaranya disebabkan masuknya dana desa yang banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan (terutama untuk desa-desa di luar Jawa). Pembangunan infrastruktur tersebut akan memudahkan akses ke dan dari desa, demikian halnya terjadinya kemudahan transportasi dan arus barang keluar-masuk desa sehingga perekonomian desa mengalami peningkatan.

Dari Gambar 2.4. diketahui bahwa jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal di Provinsi Lampung sejak tahun 2015 hingga 2018 menurun signifikan. Jumlah desa dengan status sangat tertinggal menurun dari 151 desa menjadi 131 desa pada tahun 2018. Jumlah desa tertinggal menurun dalam empat tahun terakhir, dari 1.302 desa pada tahun 2015 menjadi 1.086 desa pada tahun 2018. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Provinsi Lampung. Perubahan status desa di Provinsi Lampung disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4.
Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Lampung Menurut IDM
Tahun 2015 dan 2018

Status desa berkembang, maju dan mandiri mengalami peningkatan jumlah dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah desa berkembang adalah 912 desa kemudian meningkat menjadi 1.144 pada tahun 2018. Jumlah desa maju meningkat dari 57 desa menjadi 86 desa sejak 2015 hingga 2018. Jumlah desa mandiri meningkat lima kali lipat yang mana pada tahun 2015 berjumlah 1 (satu) desa menjadi 6 (enam) pada tahun 2018.

Peningkatan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri serta menurunnya desa sangat tertinggal dan tertinggal erat kaitannya dengan banyaknya program yang masuk ke desa, di antaranya program dana desa. Dalam empat tahun terakhir, dana desa di Indonesia secara umum dan khususnya di Provinsi Lampung difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan

dan jembatan. Perbaikan jalan dan jembatan akan meningkatkan aksesibilitas desa. Meningkatnya aksesibilitas akan memicu peningkatan volume perdagangan di berbagai sektor dan meningkatkan mobilisasi perekonomian desa. Perbaikan infrastruktur desa akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bidang-bidang lain, seperti: kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan lainnya. Hal tersebut secara kontinu akan mampu meningkatkan status desa menjadi lebih baik.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA

3.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung diwakili oleh 5 desa sampel, yang meliputi (1) Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya; (2) Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya; (3) Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang; (4) Desa Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara; dan (5) Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Mesuji Timur.

3.1.1. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Muara Tenang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Tenang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, PAD desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Kabupaten Mesuji, bantuan

keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, bungan simpanan dari bank, serta sumber pendapatan lain desa yang sah.

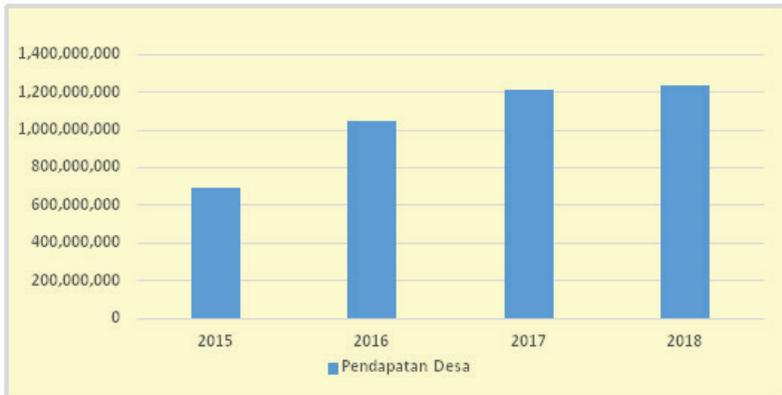
Tabel 3.1.
Pendapatan Desa Muara Tenang 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Desa	288.542.000	614.055.000	778.857.000	759.786.975
Alokasi Dana Desa	268.019.000	392.019.400	402.353.684	460.713.272
Pendapatan Asli Desa	-	-	5.000.000	7.500.000
Bagi Hasil pajak dan Retribusi Kab	-	9.522.675	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Provinsi	105.600.000	5.600.000	-	6.000.000
Bantuan Kabupaten	30.000.000	28.000.000	16.550.000	-
Lain2 pend desa	-	-	9.522.675	-
Bunga Simpanan Uang di Bank			300.000	1.000.000
APBDesa	692.161.000	1.049.197.075	1.212.583.359	1.235.000.247

Sumber: RPJMDes Muara Tenang 2015-2018

Sejak bergulirnya program dana desa pada tahun 2015, jumlah dana desa yang diperoleh Desa Wira Bangun hingga tahun 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah dana desa yang diterima Desa Wira Bangun sebesar Rp288 juta, kemudian meningkat menjadi Rp612 juta pada tahun 2016, menjadi Rp778 juta pada tahun 2017, dan turun sebesar Rp759

juta pada tahun 2018. Dalam empat tahun terakhir terjadi peningkatan dana desa yang diterima oleh Desa Wira Bangun.



Gambar 3.1.
Pendapatan Desa Muara Tenang 2015-2018



Gambar 3.2.
Kontribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pendapatan Desa Muara Tenang 2015-2018

Pada tahun 2015, APBDes Desa Muara Tenang sebesar Rp692.161.000,00. Seluruh dana desa pada tahun ini dialokasikan pada bidang pembangunan. Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat, alokasi dana desa sebesar Rp256.254.000,00, bantuan keuangan provinsi sebesar Rp105.600.000,00 dan bantuan kabupaten sebesar Rp30.000.000,00. Bidang pembangunan fisik dan infrastruktur desa menjadi prioritas pemerintah Desa Muara Tenang. Pada tahun 2016, anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan adalah Rp554.087.500,00. Pada tahun 2017, anggaran bidang pembangunan sebesar Rp741.657.000,00 dan pada 2018 sebesar Rp686.462.580,00. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2015 menghabiskan APBDes sebesar Rp256.765.174,00, pada tahun 2016 sebesar Rp382.608.075,00, pada tahun 2017 sebesar Rp272.434.343,00, dan pada tahun 2018 sebesar Rp245.963.000,00. Alokasi APBDes Muara Tenang tahun 2015-2018 ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Tenang 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Desa	692.161.000	1.049.197.075	1.212.583.359	1.235.000.247
Belanja Desa				
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	256.765.174	382.608.075	272.434.343	245.963.000
b. Bid. Pembangunan	388.542.000	554.087.500	741.657.000	686.462.580

c. Bid. Pembinaan Masyarakat	47.020.000	23.000.000	95.000.000	154.500.000
d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	-	88.467.500	8.000.000	73.990.000
e. Bidang tak Terduga	-	-		-
Jumlah Belanja	692.327.174	1.048.163.075	1.117.091.343	1.160.915.580

Sumber : APBDes Muara Tenang 2015-2018

Pendapatan Desa Muara Tenang sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan menjadi prioritas sesuai instruksi Bupati Mesuji untuk memperbaiki infrastruktur di Mesuji hingga ke tingkat desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mesuji yang didominasi tanah liat sehingga akan sulit dijangkau ketika musim hujan. Pembangunan jalan desa menjadi prioritas dalam bidang pembangunan. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah jembatan dan sarana kesehatan.

Program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Desa Muara Tenang yang berasal dari dana desa meliputi pengerasan jalan yang saat ini berada pada 2 titik, yaitu di RK 1 RT 2 dan di

RK 3 RT 7. Jenis jalan yang dibangun saat ini adalah pengerasan jalan menjadi rabat beton. Sebelum adanya dana desa, jalan di Desa Muara Tenang masih didominasi kerikil, *onderlagh*, dan tanah yang ketika hujan menjadi sulit dilalui kendaraan, baik roda dua atau roda empat. Secara langsung, kondisi jalan berpengaruh pada percepatan pembangunan ekonomi, karena sulitnya pengangkutan barang, baik hasil pertanian dan non-pertanian dari dan ke Desa Muara Tenang.

Selain pengerasan jalan, infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan Desa Muara Tenang adalah pembangunan gorong-gorong. Pembangunan gorong-gorong tahun ini berada di 3 titik, yaitu di RK 1 RT 2 (1x7m), RK 2 RT 4 (1x7m), dan di RK 4 RT 2 (1x7m). Pembangunan gorong-gorong bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan mobilitas masyarakat. Selain gorong-gorong, aparat Desa Muara Tenang membangun drainase. Drainase menjadi fokus pembangunan karena jalan yang telah dibangun akan cepat rusak terkena genangan air apabila hujan. Drainase yang baik akan membantu menjaga kualitas jalan yang telah dibangun. Fasilitas lain yang dibangun oleh aparat Desa Muara Tenang adalah jembatan di dua titik pembangunan, yakni pembangunan TPT (tembok penahan tanah) serta rehabilitasi tribun lapangan dan pembuatan taman terbuka.

3.1.2. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Bangun Jaya

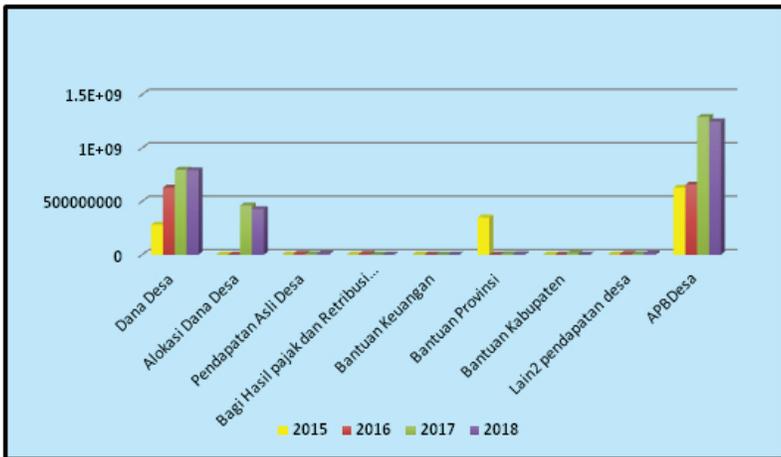
Pada tahun 2015, APBDes Desa Bangun Jaya sebesar Rp279.710.000,00 dialokasikan pada bidang pembangunan desa; Rp288.919.000,00 dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa; dan sebesar Rp59.020.000,00 dialokasikan pada bidang pembinaan kemasyarakatan.

Persentase anggaran Dana Desa terhadap pendapatan Desa Bangun Jaya, tahun 2015-2018 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Pendapatan Desa Bangun Jaya 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Desa	279.710.000	627.592.000	795.190.000	790.303.348
Alokasi Dana Desa	-	-	460.789.836	427.202.888
Pendapatan Asli Desa	-	10.000.000	6.000.000	12.000.000
Bagi hasil pajak dan retribusi Kab	-	8.548.628	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Provinsi	347.239.000	-	6.000.000	6.000.000
Bantuan Kabupaten	-	-	16.550.000	-
Lain-lain pendapatan desa	-	10.000.000	6.000.000	13.000.000
APBDes	626.949.000	656.140.628	1.290.529.836	1.248.506.236

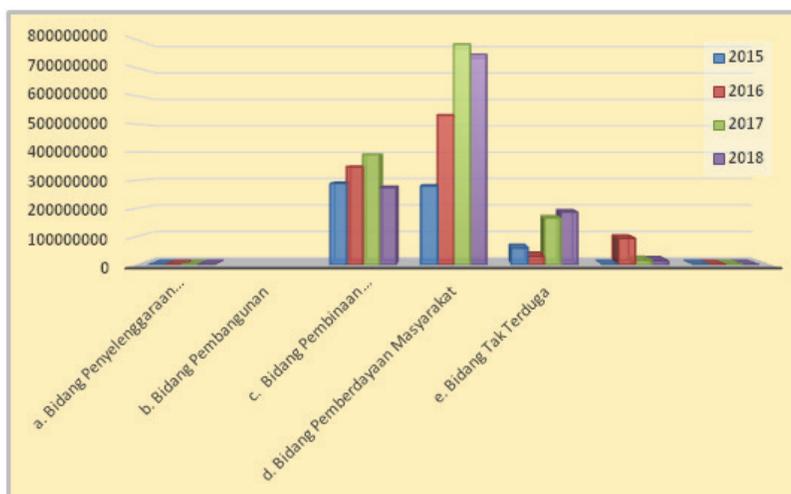
Sumber: RPJMDes Desa Bangun Jaya 2015-2018



Gambar 3.3.
Pemanfaatan Dana Desa di Bangun Jaya 2015-2018

Bidang pembangunan fisik dan infrastruktur desa menjadi prioritas pemerintah Desa Bangun Jaya. Pada tahun 2015 anggaran yang dikeluarkan untuk Bidang Pembangunan adalah Rp279.710.000,00; pada tahun 2016, anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan adalah Rp533.453.200,00; pada tahun 2017, anggaran bidang pembangunan sebesar Rp783.487.550,00; dan pada tahun 2018 sebesar Rp886.950.106,00. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2015 menghabiskan APBDes sebesar Rp288.919.000,00; tahun 2016 sebesar Rp348.620.199,00; tahun 2017 sebesar Rp336.018.464,00; dan pada tahun 2018 sebesar Rp274.807.542,00. Pada tahun 2015 anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan adalah Rp59.020.000,00; pada tahun 2016

anggaran yang dikeluarkan untuk pembinaan kemasyarakatan adalah Rp30.200.000,00; pada tahun 2017 anggaran pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp166.100.000,00; dan pada 2018 sebesar Rp187.640.000,00. Bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2015 menghabiskan dana sebesar Rp0; tahun 2016 menghabiskan dana sebesar Rp94.138.800,00; tahun 2017 menghabiskan dana sebesar Rp15.702.450,00; dan tahun 2018 menghabiskan dana sebesar Rp14.000.000,00. Alokasi APBDes Wira Bangun tahun 2015 hingga 2018 ditampilkan dalam Gambar 3.4.



Gambar 3.4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangun Jaya 2015-2018

Pendapatan Desa Bangun Jaya sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang Pembangunan

menjadi prioritas pembangunan desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di Desa Bangun Jaya dan Kabupaten Mesuji pada umumnya yang didominasi tanah liat sehingga sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang pembangunan infrastruktur dan fisik menjadi fokus utama pembangunan untuk memudahkan akses dalam upaya meningkatkan perekonomian di tingkat desa.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan Desa Bangun Jaya adalah pembangunan jalan. Jalan desa merupakan kebutuhan pokok yang mendukung percepatan pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat dalam mempercepat perekonomian di berbagai sektor, seperti: sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sektor lainnya.

3.1.3. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Wira Bangun

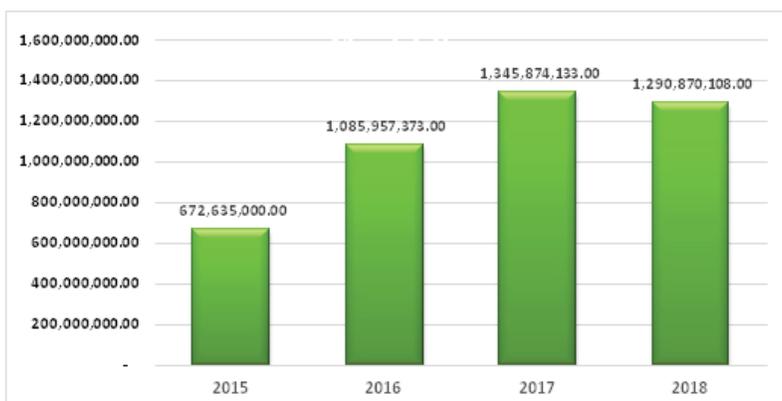
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wira Bangun terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, PAD desa, bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten Mesuji, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi dan sumber pendapatan lain desa yang sah.

Tabel 3.4.
Pendapatan Desa Wira Bangun Tahun 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Desa	286.291.000,00	642.294.000.00	812.928.000,00	753.912.028,00
Alokasi Dana Desa	386.344.000,00	405.209.000.00	494.341.760,00	521.958.080,00
Pendapatan Asli Desa	-	-	11.600.000,00	8.000.000,00
Bagi Hasil pajak dan retribusi Kab	-	10.454.373.00		-
Bantuan Keuangan				
Bantuan Provinsi	-			6.000.000,00
Bantuan Kabupaten	-	28.000.000,00	16.550.000,00	
Lain-lain pendapatan desa	-	-	10.454.373,00	1.000.000,00
APBDes	672.635.000,00	1.085.957.373,00	1.345.874.133,00	1.290.870.108,00

Sumber: RPJMDes Desa Wira Bangun 2015-2018

Sejak bergulirnya program dana desa tahun 2015, jumlah dana desa yang diperoleh Desa Wira Bangun hingga tahun 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah dana desa yang diterima Desa Wira Bangun sebesar Rp286 juta, kemudian meningkat menjadi Rp642 juta pada tahun 2016, menjadi Rp812 juta pada tahun 2017, dan turun sebesar Rp753 juta pada tahun 2018. Dalam empat terakhir tahun terjadi peningkatan dana desa yang diterima oleh Desa Wira Bangun.



Gambar 3.5.
Pendapatan Desa Wira Bangun 2015-2018

Pada tahun 2016, APBDes Desa Wira Bangun sebesar Rp672,019,734,00. Dari total APBDes, sebesar 49 persen (Rp329.708.734,00) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Sebesar 43 persen (Rp286.291.000,00) digunakan untuk Pembangunan fisik/infrastruktur. Sisanya sebesar 8 persen digunakan untuk bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang pembangunan fisik dan infrastruktur desa menjadi prioritas pemerintah Desa Wira Bangun. Pada tahun 2016 anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan adalah Rp573.949.900,00 (53 persen); tahun 2017, anggaran bidang pembangunan sebesar Rp799.121.850,00 (59 persen); dan pada 2018 sebesar Rp718.205.400,00 (59 persen). Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2016 menghabiskan APBDes sebesar Rp386.543.373,00 (36 persen);

tahun 2017 sebesar Rp342.459.872,00 (25 persen); dan pada tahun 2018 sebesar Rp262.975.932,00 (22 persen). Alokasi APBDes Wira Bangun tahun 2015 hingga 2018 ditampilkan dalam Tabel 3.5.



Gambar 3.6.

Kontribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pendapatan Desa Wira Bangun 2015-2018

Pendapatan Desa Wira Bangun sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan menjadi prioritas sesuai instruksi Bupati Mesuji untuk memperbaiki infrastruktur di Mesuji hingga ke tingkat desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mesuji yang didominasi tanah liat sehingga akan sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk memudahkan akses dalam mendukung pembangunan.

Tabel 3.5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wira Bangun 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Desa	672.635.000	1.085.957,373	1.345.874.133	1.290.870.108
Belanja Desa				
e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	329.708.734	386.543.373	342.459.872	262.975.932
f. Bid. Pembangunan	286.291.000	573.949.900	799.121.850	718.205.400
g. Bid. Pembinaan Masyarakat	37.020.000	26.600.000	194.960.000	214.000.000
h. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	19.000.000	96.344.100	13.000.000	27.456.628
e. Bidang tak Terduga	-	787.225	-	-
Jumlah Belanja	672.019.734	1.084.224.598	1.349.541.722	1.222.637.960

Sumber: APBDes Wira Bangun 2015-2018

Pendapatan Desa Wira Bangun sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan menjadi prioritas sesuai instruksi Bupati Mesuji untuk memperbaiki infrastruktur di Mesuji hingga ke tingkat desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mesuji yang didominasi tanah liat sehingga akan sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk memudahkan akses dalam mendukung pembangunan.

Pembangunan jalan desa menjadi prioritas dalam bidang pembangunan. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung

perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah gorong-gorong/jembatan, saluran drainase, dan tembok penahan tanggul (TPT). Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya untuk memelihara kualitas jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan yang tidak disertai pembangunan saluran drainase dan TPT akan menyebabkan jalan lebih cepat rusak akibat terjangan air. Jenis batu yang digunakan dalam pembangunan jalan di Desa Wira Bangun adalah batu sabes. Batu sabes dipilih untuk memperkuat jalan yang fondasi batunya telah ada. Saat ini baru sekitar 80 persen jalan di Desa Wira Bangun yang telah diperbaiki/dibangun dengan APBDes. Dibutuhkan 2 sampai dengan 3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Desa Wira Bangun. Lamanya pembangunan infrastruktur disebabkan Desa Wira Bangun memiliki wilayah yang luas.

3.1.4. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Pangkal Mas Jaya

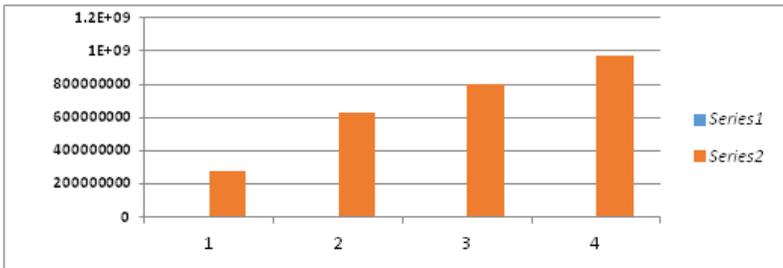
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkal Mas Jaya terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, PAD desa, bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten Mesuji, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi dan sumber pendapatan lain desa yang sah.

Tabel 3.6.
Pendapatan Desa Pangkal Mas Jaya 2015-2018

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Desa	280.212.000.00	628.713.000	796.542.000	974.890.106
Alokasi Dana Desa	254.274.000	488.522.300	347.554.532	309.423.656
Pendapatan Asli Desa	-	8.125.015	2.800.000	4.500.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab	-	6.939.332	6.939.332	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	6.000.000
Bantuan Provinsi	-	-	-	-
Bantuan Kabupaten	30.000.000	359.456.000		-
Lain2 pendapatan desa	-	-	-	-
APBDesa	564.486.000	1.451.755.647	1.153.835.864	1.294.813.762

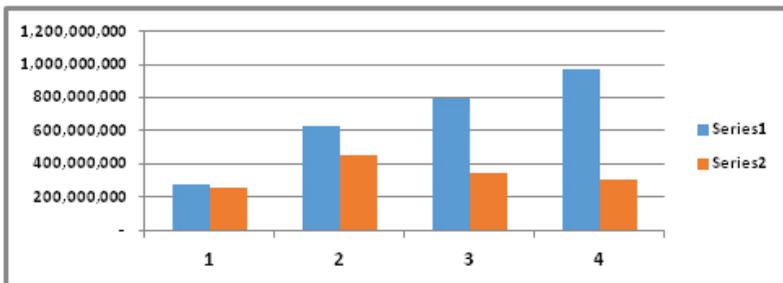
Sumber: RPJMDes Pangkal Mas Jaya 2015-2018

Sejak bergulirnya program dana desa tahun 2015, jumlah dana desa yang diperoleh Desa Pangkal Mas Jaya hingga tahun 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah dana desa yang diterima Desa Wira Bangun sebesar Rp280 juta, kemudian meningkat menjadi Rp628 juta pada tahun 2016, menjadi Rp796 juta pada tahun 2017, dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp974 juta pada tahun 2018. Dalam empat terakhir tahun terjadi peningkatan yang signifikan terkait besaran dana desa yang diterima oleh Desa Pangkal Mas Jaya.



Gambar 3.7.
Pendapatan Desa Pangkal Mas Jaya 2015-2018

Pada tahun 2015, APBDes Pangkal Mas Jaya sebesar Rp280.212.000,00. Semua dana desa pada tahun ini dialokasikan pada bidang pembangunan. Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp256.254.000,00.



Gambar 3.8.
Kontribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pendapatan Desa Pangkal Mas Jaya 2015-2018

Bidang pembangunan fisik dan infrastruktur desa menjadi prioritas pemerintah Desa Pangkal Mas Jaya.

Pada tahun 2016 anggaran yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan adalah Rp978.202.000,00; tahun 2017 anggaran bidang pembangunan sebesar Rp775.542.000,00; dan pada 2018 sebesar Rp886.950.106,00. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2016 menghabiskan APBDes sebesar Rp370.436.647,00; tahun 2017 sebesar Rp337.164.532,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp261.937.131,00. Alokasi APBDes Pangkal Mas Jaya tahun 2015 hingga 2018 ditampilkan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal Mas Jaya 2015-2018

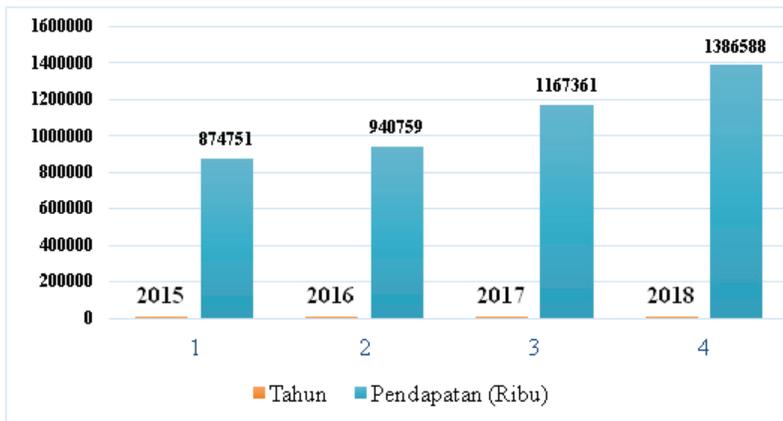
Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Desa	564.486.000	1.451.755.647	1.153.835.864	1.294.813.762
Belanja Desa				
i. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	256.254.000	370.436.647	337.164.532	261.937.131
j. Bid. Pembangunan	280.212.000	978.202.000	775.542.000	886.950.106
k. Bid. Pembinaan Masyarakat	28.020.000	15.800.000	58.400.000	86.900.000
l. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	-	87.317.000	11.000.000	27.456.628
e. Bidang tak Terduga	-	-		-
Jumlah Belanja	564.486.000	1.451.755.647	1.182.106.532	1.263.243.865

Sumber : APBDes Pangkal Mas Jaya 2015-2018

Pendapatan Desa Pangkal Mas Jaya sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan menjadi prioritas sesuai instruksi Bupati Mesuji untuk memperbaiki infrastruktur di Mesuji hingga ke tingkat desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mesuji yang didominasi tanah liat sehingga akan sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk memudahkan akses dalam mendukung pembangunan.

Pembangunan jalan desa menjadi prioritas dalam bidang pembangunan. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah jembatan dan sarana kesehatan.

3.1.5. Penggunaan Dana Desa Menurut Bidang Pembangunan Desa Sidang Muara Jaya



Gambar 3.9.

Pendapatan Desa Sidang Muara Jaya 2015-2018 (Sumber: APBDes Desa Sidang Muara Jaya)

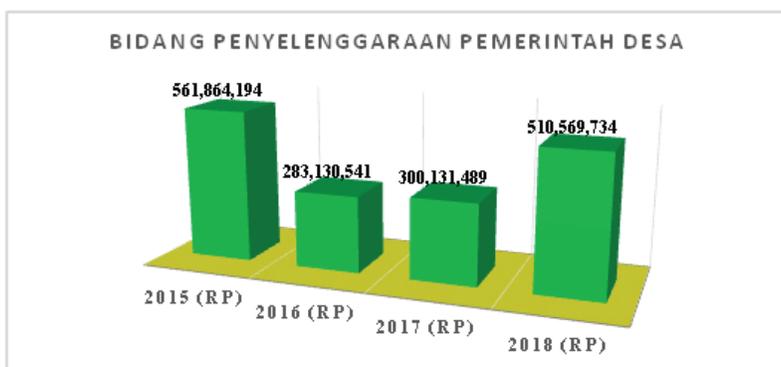
Tabel 3.8.

APBDes Desa Sidang Muara Jaya 2015-2018

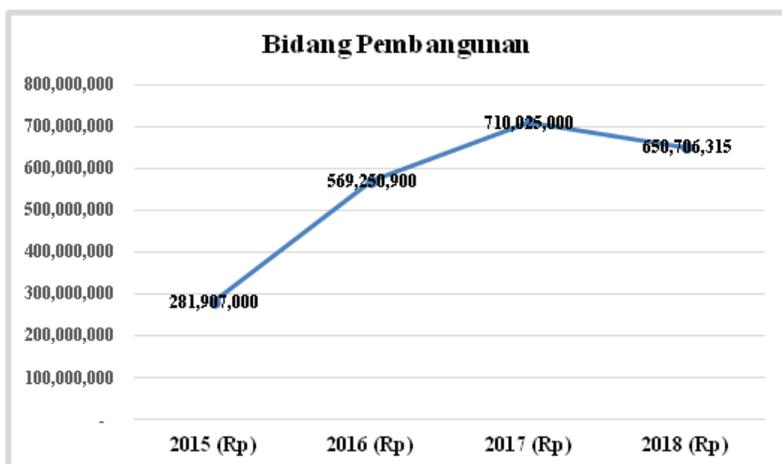
Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Desa	874.751.000	940.759.231	1.167.361.329	1.388.588.977
Belanja Desa				
Bidang Penyelenggaraan Pem Desa	561.864.194	283.130.541	300.131.489	510.569.734
Bid. Pembangunan	281.907.000	569.250.900	710.025.000	650.706.315
Bid. Pembinaan Masyarakat	34.020.000	23.000.000	121.200.000	142.000.000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	-	63.250.100	24.710.000	21.090.000

Bidang tak Terduga	-	-	-	-
Jumlah Belanja	877.791.194	938.631.541	1.156.066.489	1.324.366.049

Program dana desa telah bergulir sejak tahun 2015. Desa Sidang Muara Jaya memperoleh anggaran yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 pendapatan yang diterima Desa Sidang Muara Jaya sebesar Rp874 juta, meningkat menjadi Rp940 juta pada 2016, kemudian menjadi Rp1.167 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp1,386 miliar. Pendapatan Desa Sidang Muara Jaya tahun 2015-2018 ditampilkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.10.
Alokasi APBDes Desa Sidang Muara Jaya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2015-2017



Gambar 3.11.
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidang Muara Jaya 2015-2018

Pendapatan Desa Sidang Muara Jaya sebagian besar dialokasikan untuk bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan menjadi prioritas pembangunan desa. Bidang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di Desa Sidang Muara Jaya dan Kabupaten Mesuji pada umumnya yang didominasi tanah liat sehingga sulit dijangkau ketika musim hujan. Bidang pembangunan infrastruktur dan fisik di Desa Sidang Muara Jaya yang menjadi fokus utama adalah pembangunan jembatan penghubung kanal dan jalan desa. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memudahkan akses untuk mempercepat perekonomian di tingkat desa.

3.2. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi

3.2.1. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Desa Muara Tenang

Lembaga ekonomi yang dibentuk di Desa Muara Tenang adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dalam pemanfaatan APBDes di Desa Muara Tenang, sehingga pembangunan ekonomi belum menjadi perhatian serius pihak pemerintah desa. Lembaga ekonomi yang sudah terbentuk atas kontribusi dana desa.

BUMDes di Desa Muara Tenang bernama BUMDes Muara Arta. Anggota BUMDes Muara Arta adalah seluruh masyarakat Desa Muara Tenang yang saat ini dikelola oleh 14 orang pengurus, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Berdasarkan AD/ART, BUMDes Muara Arta memiliki 9 kegiatan usaha, yaitu perdagangan, pertanian, peternakan, pekerjaan umum, jasa, keuangan, perikanan, perhubungan, dan perkebunan. Namun saat ini yang baru berjalan hanya dari bidang peternakan, yaitu usaha ternak kambing

Kegiatan BUMDes di desa ini adalah usaha ternak kambing. Modal awal yang digunakan untuk kegiatan BUMDes sebesar Rp20.000.000,00 yang digunakan untuk membeli 20 ekor kambing yang berumur 6 bulan untuk dilakukan proses penggemukan, namun kondisi lingkungan di Desa Muara Tenang tidak cocok dengan jenis kambing yang dibudidayakan,

sehingga usaha ini mengalami kendala dan banyak kambing yang mati. Setelah mengalami kendala, pada tahun 2017 BUMDes Muara Arta menggunakan dana untuk modal usaha sebesar Rp50.000.000,00 yang berasal dari dana desa. Modal usaha tersebut kemudian dibelikan kambing kembali sebanyak 27 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes sebesar Rp73.000.000,00. Dari total pengalokasian untuk BUMDes tersebut akan dibelikan alat bangunan, seperti molen, alat cetak batako, dan alat cetak buis yang nantinya akan disewakan ke umum serta ke desa. Sehingga, pemasukan dari sewa tersebut dapat menambah pemasukan untuk BUMDes.

3.2.2.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Desa Bangun Jaya

Lembaga ekonomi yang dibentuk di Desa Bangun Jaya adalah BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam pemanfaatan APBDes di Bangun Jaya, sehingga pembangunan ekonomi belum menjadi perhatian serius pihak desa.

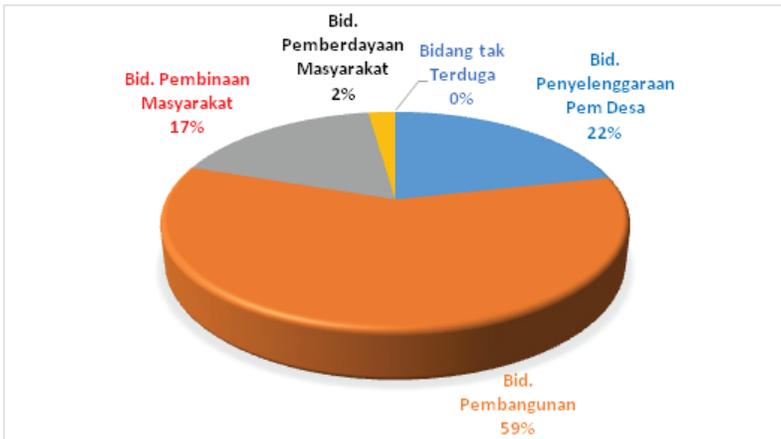
BUMDes Bangun Jaya dibentuk pada tahun 2016 namun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tahun 2018, BUMDes Desa Bangun Jaya kembali diaktifkan dan saat ini sudah berjalan selama 4 bulan. Saat ini BUMDes Desa Bangun Jaya bergerak pada pembuatan batako yang mana sejalan dengan

program Kabupaten Mesuji, yakni adanya pembangunan “Rumah Kita”. Modal awal yang digunakan untuk kegiatan BUMDes pembuatan batako sebesar Rp15.000.000,00 yang bersumber dari dana desa tahun 2017.

BUMDes pembuatan batako Desa Bangun Jaya sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena masih dikelola secara sederhana dan skala kecil. Pada tahun 2018, pemerintah Desa Bangun Jaya mengalokasikan dana sebesar Rp26.000.000,00 untuk BUMDes yang digunakan untuk membeli alat molen dengan biaya sebesar Rp22.000.000,00. Sisa dana BUMDes digunakan untuk biaya operasional pembuatan batako.

3.2.3.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Desa Wira Bangun

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dalam pemanfaatan APBDes di Desa Wira Bangun. Pembangunan ekonomi belum menjadi perhatian serius pihak pemerintah desa. Lembaga ekonomi yang sudah terbentuk atas kontribusi dana desa dan alokasi dana desa Desa Wira Bangun adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).



Gambar 3.12.
Alokasi APBDesa Desa Wira Bangun Tahun 2018

BUMDes di Desa Wira Bangun dibentuk pada tahun 2016. Jenis kegiatan BUMDes meliputi kelompok peternak kambing “Maju Sejahtera” dan kelompok industri kue rumah tangga. Anggaran yang diperoleh oleh kelompok peternak kambing sebesar Rp23 juta dari APBDes tahun 2016. Dari alokasi dana sebesar Rp23 juta diperoleh 15 ekor kambing betina. Proses pemeliharaan kambing dimulai awal tahun 2017 dan pada November 2018 telah berkembang menjadi 41 ekor. Usaha pemeliharaan kambing oleh kelompok “Maju Sejahtera” dikelola oleh 5 (lima) anggota BUMDes Kambing dan diketuai oleh Bapak Suparjiono.



Gambar 3.13.

Usaha Pemeliharaan Kambing BUMDes Desa Wira Bangun Tahun 2018

Salah satu permasalahan yang dihadapi BUMDes adalah pemilihan indukan yang kurang baik sehingga menghambat perkembangbiakan dan beberapa indukan yang mati. Setidaknya sebanyak 4 ekor indukan kambing mati akibat sakit dan kualitas kambing yang kurang baik. Meskipun demikian, secara umum usaha pemeliharaan memiliki potensi untuk berkembang. Namun, diperlukan pendampingan dalam manajemen usaha kambing serta pencatatan yang lebih baik.

Selain unit usaha pemeliharaan kambing, BUMDes Desa Wira Bangun terdapat kelompok industri kue rumah tangga yang dikelola Ibu PKK. Anggaran yang disediakan dari APBDes sebesar Rp5 juta yang digunakan untuk membeli peralatan pembuatan kue. Usaha pembuatan kue rumah tangga sempat dimulai pada tahun 2017 dengan memproduksi kue kembang goyang, tapi kemudian tidak berlanjut karena terdapat konflik

antar-anggota PKK. Saat ini kelompok ini berhenti total dari kegiatan produksi dan peralatan pembuatan kue dikembalikan kepada pemerintah desa dan diletakkan di balai desa.

3.2.4.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Desa Pangkal Mas Jaya

Lembaga ekonomi yang dibentuk di Desa Pangkal Mas Jaya adalah BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dalam pemanfaatan APBDDes di Pangkal Mas Jaya, sehingga pembangunan ekonomi belum menjadi perhatian serius pihak pemerintah desa. Lembaga ekonomi yang sudah terbentuk atas kontribusi dana desa.

BUMDes Pangkal Mas Jaya dibentuk pada tahun 2016 dengan nama Jaya Makmur. Kegiatan BUMDes di desa ini awalnya adalah usaha peternakan kambing. Modal awal yang digunakan untuk kegiatan BUMDes sebesar Rp12.000.000,00 yang digunakan untuk membeli 12 ekor kambing untuk dikembangkan, namun kondisi lingkungan di Desa Pangkal Mas Jaya tidak cocok dengan jenis kambing yang dibudidayakan, sehingga usaha ini mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, pada tahun 2017 BUMDes Jaya Makmur mengganti kegiatan usaha budidaya kambing menjadi usaha penjualan sarana produksi pertanian. Dana yang digunakan untuk modal usaha sebesar Rp17.000.000,00 yang berasal dari dana desa. Barang yang dijual di BUMDes Jaya Makmur adalah pestisida

untuk tanaman padi. Alasan pemilihan kegiatan penjualan saprotan didasarkan pada kondisi masyarakat Desa Pangkal Mas Jaya yang mayoritas adalah petani padi. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes sebesar Rp74.000.000,00. Dari total pengalokasian untuk BUMDes tersebut, sebesar Rp 24.000.000,00 digunakan untuk membeli molen, dan sisanya dialokasikan untuk pembelian pestisida dan pupuk kimia.



Gambar 3.14.

Usaha Penjualan Saprotan BUMDes Jaya Makmur Tahun 2018

3.2.5. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Desa Sidang Muara Jaya

Lembaga ekonomi yang dibentuk di Desa Sidang Muara Jaya adalah BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi

prioritas dalam pemanfaatan APBDes di Desa Sidang Muara Jaya, sehingga pembangunan bidang ekonomi non-infrastruktur belum menjadi prioritas aparat desa.

BUMDes Bangun Jaya dibentuk pada tahun 2017 namun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tahun 2018, BUMDes Desa Sidang Muara Jaya 2018 kembali diaktifkan dan diberi anggaran sebesar Rp117 juta untuk usaha batako. BUMDes pembuatan batako Desa Sidang Muara Jaya sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena masih dikelola secara sederhana dan skala kecil.

3.3.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial

3.3.1.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial

Desa Muara Tenang

APBDes Muara Tenang telah dialokasikan untuk pembangunan social. Yang dianggarkan melalui APBDes adalah pembangunan Gedung PAUD dan Gedung TPA. Pembangunan PAUD dan TPA dilaksanakan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Pembangunan PAUD dan TPA sebagai wujud dukungan Desa Muara Tenang dalam meningkatkan derajat pendidikan anak dan keagamaan di Desa Muara Tenang.

Pembangunan sosial lainnya yang dianggarkan melalui APBDes adalah pembangunan lapangan olahraga dan tribun lapangan. Pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp125.255.430,00.

Pembangunan ini sebagai wujud dukungan dari Desa Muara Tenang dalam meningkatkan kegiatan kepemudaan serta kegiatan olahraga di Desa Muara Tenang.

3.3.2.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Bangun Jaya

APBDes Bangun Jaya telah dialokasikan untuk pembangunan sosial yang realisasinya dilakukan pada tahun 2017. Pembangunan sosial melalui APBDes Desa Bangun Jaya di antaranya pembangunan 2 (dua) sarana penyediaan air bersih bagi 2 (dua) RK yang mengalami kelangkaan air bersih. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan sarana air bersih sebesar Rp50.077.400,00. Letak 2 (dua) unit sumur bor tersebut berada di sekitar lingkungan RK/Dusun. Kedalaman sumur yang dibangun sedalam 40-50 meter. Pembangunan fasilitas air bersih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bangun Jaya. Fasilitas penyediaan air bersih di Desa Bangun Jaya sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat Desa Bangun Jaya.

Pembangunan di bidang sosial yang didanai melalui APBDes Desa Bangun Jaya adalah pembangunan drainase lapangan. Pembangunan drainase lapangan bertujuan untuk meningkatkan fungsi lapangan sebagai sarana publik masyarakat desa untuk berolahraga.



Gambar 3.15.
Sumur Bor Desa Bangun Jaya

Pembangunan drainase lapangan merupakan usulan pemuda desa yang ingin menjadikan lapangan sebagai pusat olahraga masyarakat desa. Pembangunan drainase lapangan Desa Bangun Jaya didanai anggaran APBDes yang bersumber dari dana desa tahap II yang dilakukan pada akhir tahun 2018.

3.3.3. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Wira Bangun

APBDes Desa Wira Bangun telah dialokasikan untuk pembangunan sosial yang realisasinya dilakukan pada tahun 2018. Pembangunan sosial di Desa Wira Bangun yang menggunakan APBDes di antaranya pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang

menghabiskan sekitar Rp350 juta. APBDes yang terpakai dalam kegiatan ini sebesar Rp34 juta. Fasilitas PAMSIMAS saat ini sedang pada tahap pembangunan dan direncanakan akan selesai pada awal tahun 2019.

Pembangunan sosial lain yang dianggarkan melalui APBDes adalah pembangunan gedung posyandu di RK 3. Pembangunan posyandu dilaksanakan pada tahun 2018 dan dapat dimanfaatkan pada tahun 2019. Pembangunan posyandu sebagai wujud dukungan Desa Wira Bangun dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Gambar 3.16.
Proyek Pembangunan PAMSIMAS di Desa Wira Bangun



Gambar 3.17.
Pembangunan *jogging track* di lapangan Desa Wira Bangun

Selain pembangunan PAMSIMAS dan Gedung posyandu di RK 3, Pembangunan sosial lain yang dilaksanakan adalah pembangunan *jogging track* di lapangan Desa Wira Bangun. Pembangunan *jogging track* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Wira Bangun.

3.3.4.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Pangkal Mas Jaya

APBDes Pangkal Mas Jaya telah dialokasikan untuk pembangunan sosial yang realisasinya dilakukan pada tahun 2018. Pembangunan sosial di Desa Pangkal Mas Jaya yang menggunakan APBDes di antaranya pembangunan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang menggunakan APBDes sebesar Rp37.000.000,00. Letak PAMSIMAS berada di sekitar kantor desa. Kedalaman sumur yang digunakan untuk PAMSIMAS kurang-lebih 36 meter dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di semua dusun yang ada di Desa Pangkal Mas Jaya. Fasilitas PAMSIMAS saat ini sedang pada tahap pembangunan dan direncanakan akan selesai pada awal tahun 2019.

Pembangunan sosial lain yang dianggarkan melalui APBDes adalah pembangunan gedung posyandu dan gedung PAUD di RK 1. Pembangunan posyandu dan PAUD dilaksanakan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Pembangunan posyandu dan PAUD sebagai wujud dukungan Desa Pangkal Mas Jaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pendidikan anak.

3.3.5.Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Desa Sidang Muara Jaya



Gambar 3.18.
Proyek Pembangunan PAMSIMAS di Desa Pangkal Mas Jaya

Pembangunan di bidang sosial di Desa Sidang Muara Jaya adalah pembangunan fasilitas PAMSIMAS di tiga RK (Dusun). Pembangunan PAMSIMAS merupakan upaya penyediaan air bersih berbasis masyarakat. Air menjadi kebutuhan pokok yang sulit diperoleh masyarakat Desa Sidang Muara Jaya. Wilayah Desa Sidang Muara Jaya berada di wilayah pesisir yang langka dengan air bersih. Air yang tersedia di Desa Sidang Muara Jaya merupakan air payau. Masyarakat harus membeli air bersih

untuk kebutuhan memasak dengan harga Rp5000,00/jeriken. Untuk kebutuhan MCK, masyarakat menggunakan air kanal yang payau.

PAMSIMAS di Desa Sidang Muara Jaya dibangun pada tahun 2016 dengan pendanaan dari berbagai pihak dan juga dana desa. Meskipun secara program bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa Sidang Muara Jaya, PAMSIMAS saat ini tidak berjalan (mati). Kegagalan Program PAMSIMAS disebabkan banyak kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya listrik untuk menggerakkan mesin pompa air dan air di Desa Sidang Muara Jaya keruh /payau sehingga tidak layak dikonsumsi.

3.4.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

3.4.1.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Tenang

Sejak bergulirnya dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015, APBDes Desa Muara Tenang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, gorong-gorong, drainase, jembatan, dan tembok penahan tanah (TPT). Sedangkan program lain yang berkait dengan kemiskinan belum menjadi prioritas. Secara langsung, dampak pembangunan melalui APBDes belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi masyarakat menilai bahwa adanya dana desa telah meningkatkan perbaikan infrastruktur desa, khususnya jalan. Perbaikan jalan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam mengakses

kebutuhan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebutuhan lainnya.

3.4.2.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Bangun Jaya

Sejak bergulirnya Dana Desa tahun 2015, APBDes Desa Bangun Jaya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, gorong-gorong, jembatan, dan drainase). Sedangkan program lain yang berkaitan kemiskinan belum menjadi prioritas. Secara langsung, dampak pembangunan melalui APBDes belum terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun demikian masyarakat menilai bahwa adanya dana desa telah mampu meningkatkan pembangunan desa secara umum, khususnya pembangunan infrastruktur desa (khususnya jalan desa). Perbaikan jalan meningkatkan mobilisasi masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebutuhan lainnya.

Catatan penting dalam pembangunan di Desa Bangun Jaya adalah pembangunan baru menyentuh jalan antar-RK/Dusun dan belum menyentuh perbaikan jalan pertanian. Jalan pertanian di Desa Bangun Jaya masih berupa tanah liat yang akan sangat sulit dilewati ketika musim penghujan. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam pengangkutan dan sarana produksi usaha tani serta hasil jual-beli hasil pertanian. Perbaikan jalan pertanian dinilai akan berdampak besar

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Jaya yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani.

3.4.3.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Wira Bangun

Sejak bergulirnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015, APBDes Desa Wira Bangun diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, gorong-gorong, jembatan, saluran air, dan tembok penahan tanggul [TPT]). Sedangkan program lain yang berkaitan kemiskinan belum menjadi prioritas. Secara langsung, dampak pembangunan melalui APBDes belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi masyarakat menilai bahwa adanya dana desa telah meningkatkan perbaikan infrastruktur desa, khususnya jalan. Perbaikan jalan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam mengakses kebutuhan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebutuhan lainnya.

Catatan yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Desa Wira Bangun adalah pembangunan belum menyentuh perbaikan jalan pertanian. Saat ini perbaikan jalan masih sebatas pada jalan penghubung antar RK (Dusun) dan belum pada jalan pertanian. Jalan pertanian di Desa Wira Bangun masih berupa tanah liat yang akan sangat sulit dilewati ketika musim penghujan. Akibatnya menyulitkan masyarakat dalam pengangkutan dan sarana produksi usaha tani. Perbaikan jalan pertanian dinilai akan memiliki dampak yang besar terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wira Bangun yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai petani.

3.4.4.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pangkal Mas Jaya

Sejak bergulirnya dana desa pada tahun 2015, APBDes Desa Pangkal Mas Jaya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, gorong-gorong, dan jembatan). Sedangkan program lain yang berkaitan kemiskinan belum menjadi prioritas. Secara langsung, dampak pembangunan melalui APBDes belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi masyarakat menilai bahwa adanya dana desa telah meningkatkan perbaikan infrastruktur desa khususnya jalan. Perbaikan jalan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam mengakses kebutuhan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kebutuhan lainnya.

3.4.5.Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidang Muara Jaya

Sejak bergulirnya dana desa tahun 2015, APBDes Desa Sidang Muara Jaya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa dan jembatan penghubung kanal). Sedangkan program lain yang berkaitan kemiskinan belum menjadi prioritas. Secara langsung, dampak pembangunan melalui APBDes belum terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun demikian masyarakat menilai bahwa

adanya dana desa telah mampu meningkatkan pembangunan desa secara umum, khususnya pembangunan infrastruktur desa (khususnya jalan desa). Perbaikan jalan meningkatkan mobilisasi masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kebutuhan lainnya.

2.5. Kontribusi Dana Desa terhadap Perubahan Status Desa

Terdapat tiga (3) dimensi yang digunakan untuk menganalisis kontribusi dana desa terhadap perubahan status desa: pertama, dimensi ketahanan sosial; kedua dimensi ketahanan ekonomi; dan yang ketiga dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan.

Dimensi ketahanan sosial terdiri dari empat (4) parameter, yaitu: sarana kesehatan; sarana pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA negeri yang ada di wilayah desa tertentu; modal sosial; dan permukiman. Parameter sarana kesehatan dilihat dari sub-pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Parameter sarana pendidikan dilihat dari sub-akses pendidikan dasar dan menengah dan akses ke pengetahuan. Parameter modal sosial ditinjau dari sub-aspek solidaritas dan kesejahteraan sosial. Parameter permukiman ditinjau dari sub-akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses komunikasi dan informasi.

Dimensi ketahanan ekonomi terdiri dari enam (6) parameter, yaitu: keragaman produksi, pusat layanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, akses ekonomi dan keterbukaan wilayah. Dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan terdiri dari dua (2) parameter, yaitu: kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

3.5.1. Desa Bangun Jaya

Analisis untuk dimensi ketahanan sosial di Desa Bangun Jaya, dana desa berkontribusi besar untuk perbaikan dan pelebaran jalan desa namun tidak ada perubahan yang signifikan waktu tempuh. Sarana yang dibutuhkan lebih pada prasarana kesehatan, dikarenakan tempat yang tidak berpindah. Ketersediaan jalan yang mulai membaik memudahkan masyarakat dalam menempuh jalan ke lokasi lain. Bila menggunakan sarana motor, dahulu waktu tempuh 25 menit, sekarang bisa mencapai waktu 15 menit.

Kontribusi dana desa terlihat pada akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu. Pada tahun 2015, akses menuju poskesdes memang belum terlalu baik, sejak tahun 2018 akses jalan terutama ke layanan kesehatan yang ada di desa mulai dibenahi dan baik. Tenaga kerja kesehatan yang digunakan pada tahun 2015 hanya kader posyandu, namun pada tahun 2018 ini sudah adanya bidan sebagai tenaga kerja tambahan di puskesmas. Pada tahun 2015 memang belum memiliki

bidan yang dipekerjakan, hanya ada 1 kader posyandu yang dipekerjakkkan, namun saat ini telah ada bidan sebagai tenaga tambahan di puskesmas. Pada tahun 2015, tingkat kepesertaan masyarakat yang mengikuti BPJS memang belum ada, namun pada tahun 2018 ini telah mengikuti BPJS

Kontribusi dana desa juga terlihat pada akses ke sarana pendidikan, khususnya akses pendidikan dasar dan menengah. Ada perubahan akses jalan menuju SD/MI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan akses jalan ke sekolah mulai dibenahi dan lokasi sekolah memang dijadikan dalam satu kawasan. Pada tahun 2015 hingga sekarang, Desa Bangun Jaya belum memiliki taman bacaan untuk masyarakat, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2018 ini sudah ada taman bacaan bagi anak-anak khusus untuk mengaji di masjid atau musala di beberapa RK

Analisis parameter permukiman kontribusi dana desa terlihat dengan adanya perubahan pada akses air bersih dan air minum layak, yaitu mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak serta terbukanya akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan cuci. Terdapat pula perubahan kepada akses berupa sanitasi dengan mayoritas penduduk desa memiliki jamban. Perubahan terjadi sejak tahun 2015, saat itu masih banyak penduduk yang belum memiliki sumber air bersih, terutama pada Rukun Keluarga (dusun) 5 dan RK 6, namun saat ini, tahun 2018, telah dibangun sumber air bersih berupa sumur bor di RK 1, 3, 5. Ketiga RK itu yang belum memiliki sumber air bersih. Perubahan terjadi periode tahun

2015 ke tahun 2018: akses masyarakat desa dalam memperoleh sumber air bersih sudah tidak harus mengambil ke tempat yang jauh; telah dilakukan pembuatan sumur bor di RK yang masih sulit mendapatkan air bersih. Mayoritas penduduk saat ini sudah memiliki sumber air bersih di tiap rumahnya. Pada tahun 2015 mayoritas masyarakat masih menggunakan jamban di rumahnya, pada tahun 2018 sebagian masyarakat beralih pada MCK yang lebih modern di rumahnya

Analisis dimensi ekonomi, khususnya pusat layanan perdagangan, ada kontribusi dana desa untuk akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen, dan semi-permanen). Kontribusi dana desa juga terlihat pada adanya perubahan pada jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan adanya perubahan pada kualitas jalan desa. Pada tahun 2015 belum banyak masyarakat yang menggunakan *handphone* atau *smartphone*, namun sejak tahun 2018 telah banyak masyarakat yang menggunakan *smartphone* atau *hp* untuk berkomunikasi. Perubahan juga terjadi dalam hal penggunaan internet. Pada tahun 2015 belum banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk mencari informasi dari luar, namun saat ini sudah ada masyarakat yang menggunakan internet di unit keluarga. Hasil analisis yang perlu dicermati di desa Bangun Jaya adalah terjadinya penurunan gotong-royong pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kebiasaan gotong-royong sudah mulai pudar dari masyarakat desa, walau saat ini masih terlihat meskipun tidak seperti pada tahun 2015. Hal lain, yaitu sejak tahun 2015, masih terjadi

pencemaran, khususnya pada udara dan air karena jalan desa yang belum baik. Saat ini pencemaran air dirasakan masyarakat, terutama pada RK 5 dan 6.

3.5.2. Desa Muara Tenang

Analisis untuk dimensi ketahanan sosial di Desa Muara Tenang dalam hal pelayanan kesehatan, terdapat kontribusi dana desa. Desa telah mengalami perubahan pada tahun 2015. Jarak tempuh masih sekitar 30 menit karena jalan yang masih belum bagus, namun sekarang sudah mudah dan waktu tempuh hanya memerlukan waktu 15 menit. Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu mengalami perubahan karena saat ini akses jalan sudah diperbaiki. Aktivitas posyandu mengalami perubahan karena saat ini fasilitas di posyandu sudah cukup memadai sehingga masyarakat lebih memilih berobat ke posyandu.

Akses pendidikan dasar dan menengah mengalami perubahan dengan adanya dana desa. Akses menuju ke SMP mengalami perubahan, selain karena adanya perbaikan jalan, perubahan ini juga karena lokasi SMP yang pindah ke Desa Muara Tenang. Akses ke SMA juga mengalami perubahan karena perbaikan jalan dan sudah berdirinya SMA di Desa Muara Tenang. Pusat keterampilan atau kursus di desa belum ada, tetapi ada di luar desa, dan akses menuju luar desa saat ini sudah bagus sehingga mengalami perubahan percepatan waktu tempuh menuju ke tempat kursus.

Keadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar, ada kontribusi dana desa berupa pembuatan ikon desa di ruang publik. Masyarakat khususnya remaja di desa biasa menggunakan lapangan untuk tempat berkumpul. Selain digunakan sebagai sarana olahraga, di sana juga terdapat ikon desa yang bisa digunakan untuk berfoto. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga berupa lapangan sepak bola sudah tersedia. Ini tidak lepas dari hasil kontribusi dana desa.

Masyarakat desa juga bergotong-royong untuk memelihara serta mengaktifkan poskamling. Partisipasi warga sangat tinggi dan apabila mereka melanggar jadwal siskamling akan dikenakan sanksi, sebagai hal lain dari ruang publik yang telah terorganisir.

Dalam hal parameter permukiman, akses air bersih dan air minum layak rata-rata masyarakat Desa Muara Tenang memiliki air bersih untuk mandi dan mencuci. Kontribusi dana desa terdapat dalam pembuatan sumur bor. Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak, akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan cuci serta mayoritas penduduk desa sudah memiliki jamban.

Akses komunikasi dan informasi di Desa Muara Tenang sudah mudah dalam mengakses internet, bahkan di kantor kepala desa sudah terpasang wifi, yang ini tiada lepas dari kontribusi dana desa dalam penyediaan wifi.

Analisis dimensi ketahanan ekonomi di Desa Muara Tenang, kontribusi dana desa di Desa Muara Tenang terdapat lebih dari satu kegiatan ekonomi, di antaranya sebagai petani

padi, petani kebun dan wiraswasta serta jasa. Perubahan terjadi karena akses menuju pusat perdagangan saat ini lebih mudah karena sudah diperbaiki dengan menggunakan dana desa.

Parameter keterbukaan wilayah yang diinisiasi dari adanya dana desa mewujudkan pada jalan tipe *onderlagh* (pengerasan jalan dengan pemberian bebatuan padas, yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengaspalan). Moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum) sudah masuk ke Desa Muara Tenang berupa bus yang melewati desa kendati hanya lewat pada pagi hari saja. Moda individualnya tentu saja sepeda motor melalui kualitas jalan desa yang masih berupa *onderlagh*.

3.5.3. Desa Pangkal Mas Jaya

Dimensi yang digunakan untuk menganalisis kontribusi dana desa terhadap perubahan status desa adalah: pertama, dimensi ketahanan sosial; kedua, dimensi ketahanan ekonomi; dan yang ketiga, dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan.

Dimensi ketahanan sosial terdiri dari empat (4) parameter, yang terdiri dari sarana kesehatan; sarana pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA negeri yang ada di wilayah desa tertentu; modal sosial; dan permukiman. Parameter sarana kesehatan dilihat dari sub-pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Parameter sarana pendidikan dilihat dari sub-akses pendidikan dasar dan menengah dan akses ke pengetahuan. Parameter modal sosial

ditinjau dari sub-aspek solidaritas dan kesejahteraan sosial. Parameter permukiman ditinjau dari sub-akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses komunikasi dan informasi. Analisis untuk dimensi ini, adanya dana desa di Desa Pangkal Mas Jaya berkontribusi positif dan tampak.

Dimensi ketahanan ekonomi terdiri dari enam (6) parameter, yaitu: keragaman produksi, pusat layanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, akses ekonomi dan keterbukaan wilayah. Pada dimensi ini, kontribusi dana desa belum tampak dan tidak berperan maksimal.

Dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan terdiri dari dua (2) parameter, yaitu: kualitas lingkungan serta potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Pada dimensi ini kontribusi dana desa tidak ada.

3.5.4. Desa Sidang Muara Jaya

Dimensi yang digunakan untuk menganalisis kontribusi dana desa terhadap perubahan status desa: pertama, dimensi ketahanan sosial; kedua, dimensi ketahanan ekonomi; dan yang ketiga, dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan.

Dimensi ketahanan sosial terdiri dari empat (4) parameter, yang terdiri dari sarana kesehatan, sarana pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA negeri yang ada di wilayah desa tertentu, modal sosial, dan permukiman. Parameter sarana

kesehatan dilihat dari sub-pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dan jaminan kesehatan. Parameter sarana pendidikan dilihat dari sub- akses pendidikan dasar dan menengah dan akses ke pengetahuan. Parameter modal sosial ditinjau dari sub-aspek solidaritas dan kesejahteraan sosial. Parameter permukiman ditinjau dari sub-akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses komunikasi dan informasi. Dana desa di Desa Sidang Muara Jaya berkontribusi positif terhadap penyediaan air bersih dan kesehatan yang mana anggaran dana desa dimanfaatkan untuk penunjang operasional posyandu. Namun dana desa belum berperan dalam pengembangan sarana pendidikan.

Dimensi ketahanan ekonomi terdiri dari enam (6) parameter, yaitu: keragaman produksi, pusat layanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, akses ekonomi dan keterbukaan wilayah. Pada dimensi ini, kontribusi dana desa belum tampak dan tidak berperan maksimal.

Dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan terdiri dari dua (2) parameter, yaitu: kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Pada dimensi ini kontribusi dana desa tidak ada.

Dalam aspek modal sosial, masyarakat di Desa Sidang Muara Jaya bergotong royong untuk memelihara kebersihan kanal. Partisipasi masyarakat sangat tinggi karena masyarakat memahami pentingnya gotong-royong dalam pembersihan kanal.

Dalam hal parameter permukiman, akses air bersih dan air minum belum tersedia di Desa Sidang Muara Jaya. Masyarakat masih memanfaatkan air hujan untuk konsumsi dan membeli air. Air kanal digunakan untuk MCK. Dana desa telah berperan dalam pembangunan PAMSIMAS tetapi tidak berjalan karena tidak tersedia listrik untuk menggerakkan mesin pompa air dan kualitas air yang buruk.

Akses komunikasi dan informasi di Desa Sidang Muara Jaya sangat sulit karena jaringan telepon belum masuk. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, khususnya internet, pemerintahan desa memasang wifi, yang penyediaan akses ini diperoleh dari kontribusi dana desa. Analisis dimensi ketahanan ekonomi di Desa Sidang Muara Jaya, kontribusi dana desa di Desa Sidang Muara Jaya menyebar ke beberapa kegiatan ekonomi, di antaranya: nelayan, petani padi, wiraswasta, serta pelaku sektor jasa. Perubahan terjadi karena akses menuju pusat perdagangan saat ini lebih mudah karena sudah diperbaiki dengan peran dana desa dan pengembangan BUMDes yang bergerak dalam usaha penyediaan sarana produksi pertanian.

Parameter keterbukaan wilayah dari adanya dana desa adalah pembangunan jembatan penghubung kanal yang telah membuka akses keluar-masuk desa. Adanya jembatan telah meningkatkan pergerakan ekonomi, yang awalnya terbatas dalam mobilitas karena hanya melalui sarana kanal. Secara umum, akses jalan di Desa Sidang Muara Jaya masih berupa jalan tanah sehingga masih memerlukan pembangunan infrastruktur.

3.5.5. Desa Wira Bangun

Analisis dimensi ketahanan sosial berupa perbaikan akses jalan di desa; pembangunan puskesmas rawat inap kecamatan di Desa Wira Bangun dan pembangunan fasilitas posyandu, yang berbiaya senilai Rp180 juta dari dana desa.

Dimensi ketahanan sosial terdiri dari empat (4) parameter, yaitu: penyediaan sarana kesehatan; sarana pendidikan, yang terdiri dari SD, SMP, SMA negeri yang ada di wilayah desa tertentu; modal sosial; dan permukiman. Parameter sarana kesehatan dilihat dari sub-pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, dan jaminan kesehatan. Parameter sarana pendidikan dilihat dari sub-akses pendidikan dasar dan menengah dan akses ke pengetahuan. Parameter modal sosial ditinjau dari sub-aspek solidaritas dan kesejahteraan sosial. Parameter permukiman ditinjau dari sub-akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses komunikasi dan informasi. Analisis untuk dimensi ini, adanya dukungan dana desa di Desa Wira Bangun berkontribusi positif dan tampak. Dimensi ketahanan ekonomi terdiri dari enam (6) parameter, yaitu: keragaman produksi, pusat layanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, akses ekonomi dan keterbukaan wilayah. Pada dimensi ini, kontribusi dana desa Wira Bangun belum tampak dan tidak berperan maksimal.

Dimensi ketahanan ekologi atau lingkungan terdiri dari dua (2) parameter, yaitu: kualitas lingkungan, potensi rawan

bencana dan tanggap bencana. Pada dimensi ini, kontribusi dana Desa Wira Bangun tidak ada.

3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pemanfaatan Dana Desa

3.6.1. Desa Bangun Jaya

Desa Bangun Jaya merupakan salah satu Desa di Kabupaten Mesuji yang mendapatkan bantuan dana desa dan dimanfaatkan di bidang pengembangan lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi yang dibentuk dari dana desa berbentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang baru terbentuk pada tahun 2018 ini, yang baru berumur empat bulan (baru terbentuk sekitar Agustus 2018).

Pengalokasian dana desa untuk bidang lain, seperti: infrastruktur jalan, sumur bor pada rukun keluarga atau dusun (RK 1 dan RK 5), empat gorong-gorong (RK 1 dan 4), pengembangan drainase yang dikembangkan serta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar-rukun keluarga atau dusun. Tahap pertama pembangunan infrastruktur, terdiri dari 4 gorong-gorong, 1 jembatan, dan 2 sumur bor.

Kegiatan yang didanai adalah penyediaan air bersih dengan dibangun sumur bor untuk RK 1 dan 5, perbaikan jalan sebagai akses masyarakat antar-RK maupun desa, penyediaan alat molen untuk BUMDES. Dana desa yang dialokasikan khusus untuk keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1 belum ada dan belum terlalu terasa manfaatnya, terutama masyarakat

yang masih tergolong pada kategori pra-sejahtera dan sejahtera 1 karena dana desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa.

Masyarakat Desa Bangun Jaya berharap agar pemanfaatan dana desa bisa ditingkatkan kembali untuk tahun berikutnya dan perlunya evaluasi terhadap hasil yang sudah didapat, serta sosialisasi yang baik dari pemerintah untuk pemanfaatan dana desa tersebut. Dengan adanya dana desa, diharapkan bisa menambah kembali sumber air bagi rukun keluarga yang belum ada atau belum punya, adanya penerangan jalan desa, dan merambah ke sektor lainnya, seperti perikanan dan ternak.

Tabel 3.9.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Bangun Jaya

No	INDIKATOR	URAIAN
1.	Lembaga	- Terbentuknya BUMDES sejak bulan Agustus 2018
2.	Kontribusi	- Sangat berperan untuk pembangunan Desa Bangun Jaya
3.	Alokasi	- Pembangunan infrastruktur jalan, sumur bor, gorong-gorong, dan jembatan - Belum ada alokasi khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1
4.	Kendala	- Belum ditemukan kendala khusus
5.	Manfaat	- Sangat bermanfaat
6.	Harapan	- Alokasi khusus untuk masyarakat pra-sejahtera dan sejahtera 1- Penambahan sumber air, penerangan jalan desa, pembangunan sektor perikanan dan ternak

Tabel 3.10.

Faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan Dana Desa Bangun Jaya

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
- Akses menuju desa relatif mudah	- Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan desa tergolong rendah
- Dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten	- Aparat kamtibmas kurang berperan aktif
- Potensi lahan perkebunan karet	- Akses menuju desa relatif sulit (belum tersedia angkutan umum).
- Sumber air bersih telah tersedia di tiap RK	- Prasarana jalan desa masih perlu peningkatan
- Kekerabatan dan silaturahmi dalam masyarakat masih terjaga	- Sanitasi lingkungan yang kurang memadai
- Jaringan komunikasi terutama dalam penggunaan HP masyarakat sudah cukup tinggi	- Kualitas SDM masyarakat masih rendah
- Fasilitas pendidikan (SD s/d SLTA) yang memadai	- Adanya konflik yang terjadi antar-beberapa masyarakat dengan perusahaan
- Fasilitas kesehatan yang memadai	- BUMDES belum aktif
- Jaringan listrik PLN tersedia	
- Tersedianya alat kantor desa yang memadai, kekerabatan dan silaturahmi dalam masyarakat masih terjaga	
- Juara desa tingkat kabupaten tahun 2013	
- Semangat gotong-royong dan kerjasama dalam pembangunan relatif tinggi	

Faktor peluang yang dapat menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan dana desa di Desa Bangun Jaya di antaranya adalah, tersedia ADD dan DD yang dialokasikan setiap tahun, bantuan pemerintah daerah dan pusat untuk pembangunan rumah layak huni (rumah kita/prolahu), terdapat bantuan

rastra dan rastrada, serta terdapat pendampingan pembangunan desa oleh Kemendes.

Faktor tantangan atau ancaman yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Bangun Jaya, di antaranya adalah prospek desa yang makin meredup, daya tarik investor yang rendah, serta harga hasil bumi cenderung turun.

2.5.3. Desa Pangkal Mas Jaya

Desa Pangkal Mas Jaya merupakan salah satu Desa di Kabupaten Mesuji yang mendapatkan bantuan dana desa dan dimanfaatkan di bidang pengembangan lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi yang dibentuk dari dana desa berbentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Kontribusi dana desa terhadap pendirian lembaga ekonomi desa sekitar 10% (persen) untuk pendirian BUMDes, sisanya, 74%, untuk pengembangan BUMDes dari dana desa. Pendirian lembaganya sendiri menghabiskan dana sekitar Rp17.000.000,00 dan berdiri sejak tahun 2017. Dana pengembangan BUMDes menggunakan dana desa sebesar Rp 74.000.000,00 yang digunakan untuk membeli sarana produksi dan molen (alat untuk pembuatan infrastruktur jalan). Dana pengembangan BUMDes selain didapat dari dana desa juga mendapat bantuan dari Kementerian Desa sebesar Rp50.000.000,00.

Dana desa digunakan untuk membeli sarana produksi pertanian, kemudian hasil dari usaha BUMDes tersebut

dikembalikan ke desa. Dana desa digunakan secara optimal untuk pengembangan BUMDes, berupa pembelian molen dan sarana produksi pertanian. Khusus untuk sarana produksi pertanian, cukup bermanfaat karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani padi. Dana desa juga diakokasikan untuk bidang lain, seperti infrastruktur, alokasi khusus untuk simpan pinjam, atau usaha padat karya tunai.

Kendala di Desa Pangkal Mas Jaya terletak pada masalah belanja. Berbelanja melalui *sales* masih terlalu tinggi harganya karena belum ada potongan harga atau tambahan potongan bila membeli langsung dari pabrik atau pusat. Kendala lain berasal dari persepsi masyarakat di desa sendiri yang masih beranggapan bahwa adanya BUMDes belum berpengaruh untuk meringankan beban masyarakat, justru dianggap memberatkan. Kendala lain yang dirasakan perihal kurangnya SDM andal, sehingga dalam menjalankan usaha menjadi kurang maksimal. Kendala lainnya adalah minimnya pelatihan-pelatihan bagi anggota BUMDes. Dana desa yang dialokasikan khusus untuk keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1 sudah ada dalam bentuk program padat karya tunai. Program ini dikerjakan oleh warga secara bergilir dengan upah sebesar Rp100.000,00 per hari dengan jam kerja selama 6 (enam) jam per hari. Khusus pada tahun 2018, terdapat beberapa program yang dikhususkan untuk keluarga pra dan sejahtera 1, misalnya pembuatan rapat beton, timbun tanah merah, dan program pamsimas (program air bersih masyarakat). Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang level pra-sejahtera dan sejahtera 1,

terutama pada program pamsismas yang membantu masyarakat mengurangi biaya rumah tangga untuk membeli air bersih.

Masyarakat Pangkal Mas Jaya berharap bahwa pemanfaatan dana desa dapat ditingkatkan kembali untuk tahun berikutnya. Diperlukan evaluasi terhadap hasil yang sudah didapat, serta sosialisasi yang baik dari pemerintah untuk pemanfaatan dana desa berikutnya. Masyarakat prasejahtera dan sejahtera 1 secara khusus berharap dilakukan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.11.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Pangkal Mas Jaya

No	INDIKATOR	URAIAN
1.	Lembaga	- Terbentuknya BUMDes Desa Pangkal Mas Jaya sejak 2017
2.	Kontribusi	- Sangat berperan untuk pembangunan Desa Pangkal Mas
3.	Alokasi	- Pendirian BUMDes 10% dari dana desa, 74% dialokasikan untuk pengembangan BUMDes- Dana pengembangan BUMDes digunakan untuk membeli sarana produksi dan molen - Ada dana alokasi khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1 dalam bentuk program padat karya tunai
4.	Kendala	- Kendala berbelanja melalui sales (penjual) dengan harga tinggi - Persepsi warga desa bahwa BUMDes masih memberatkan masyarakat - SDM untuk BUMDes dianggap kurang - Tidak ada pelatihan untuk anggota BUMDes
5.	Manfaat	- Sangat bermanfaat
6.	Harapan	- Alokasi khusus untuk masyarakat pra-sejahtera dan sejahtera 1, khususnya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur

Tabel 3.12.
Faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan
Dana Desa Pangkal Mas Jaya

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
- Kamtibmas relatif baik	- Sumber air bersih untuk konsumsi harus beli
- Kekerabatan dalam masyarakat masih terjaga	- Belum tersedia energi listrik dari PLN.
- Silaturahmi masyarakat masih terjaga	- Jaringan komunikasi seluler yang belum baik
- Kegiatan gotong-royong masih terjaga.	- Prasarana jalan desa masih perlu peningkatan
- Pusat pertanian tanaman pangan (padi) di Kecamatan Mesuji	- Sanitasi lingkungan yang belum memadai.
- Kondisi geografis cocok untuk perikanan	- Kualitas SDM masyarakat masih rendah
- Sumber air melimpah	- Rendahnya potensi geografis dan klimatologis.
- Pekarangan rumah cukup luas	- Konversi lahan dan komoditas dari perkebunan ke tanaman pangan
	- Kualitas jalan menuju lahan pertanian tidak baik
	- Wabah flu burung setiap tahun berulang.
	- Pola pikir masyarakat masih terpaku pada satu bidang usaha
	- Akses menuju pasar masih sulit
	- Jumlah jembatan sedikit
	- Minimnya peluang kerja
	- Kekompakan petani perlu dibangun
	- Masih ada satu rumah yang dihuni oleh 2 KK

Faktor peluang yang dapat menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan dana desa di Desa Pangkal Mas Jaya di

antaranya adalah tersedianya alokasi dana desa dan dana desa yang dialokasikan setiap tahun, tanah desa (bengkok) kurang-lebih 6 (enam) ha, bantuan pemerintah daerah dan pusat untuk pembangunan rumah layak huni (prolahu), terdapat bantuan rastera dan rastrada, terdapat pendampingan pembangunan desa oleh Kemendes, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dana bantuan pemkab untuk pengadaan genset dan *wi-fi*.

Faktor tantangan atau ancaman yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Pangkal Mas Jaya, di antaranya prospek desa yang makin meredup, daya tarik investor yang rendah, pencemaran limbah sawit, kriminalitas di sekitar Sungai Buaya, serta akses menuju desa yang sulit.

2.5.4. Desa Sidang Muara Jaya

Salah satu desa di Kabupaten Mesuji yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa adalah Desa Sidang Muara Jaya, berupa bantuan dana desa. Dana bantuan itu dimanfaatkan di bidang pengembangan lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi yang dibentuk dari dana desa berbentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Tabel 3.13.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Sidang Muara Jaya

NO	INDIKATOR	URAIAN
1.	Lembaga	- Terbentuknya BUMDes Desa Sidang Muara Jaya
2.	Kontribusi	- Sangat berperan untuk pembangunan Desa Sidang Muara Jaya
3.	Alokasi	- Pendirian BUMDES memakai dana 18% sampai 20% dari dana desa. - penyediaan air bersih dan jalan beton, jual-beli pupuk untuk petani dan program usulan pembangunan jembatan - Ada dana alokasi khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1 dalam bentuk program bantuan bagi anak yatim dan para orang tua manula atau jompo serta program padat karya tunai
4.	Kendala	- Dukungan dana yang masih dirasakan kurang - SDM untuk BUMDes dianggap kurang - Tidak ada pelatihan untuk anggota BUMDes
5.	Manfaat	- Sangat bermanfaat
6.	Harapan	- Alokasi dana desa diharapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya dalam pengembangan industri rumahan kerupuk udang dan ikan.

Pengalokasian dana desa untuk lembaga ekonomi, khususnya BUMDes, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, khususnya pembelian pupuk. Selain itu, dana desa dialokasikan untuk modal usaha dan berbagai pelatihan bagi pengurus BUMDes. Penggunaan dana desa untuk BUMDes sekitar 18%-20%.

Kegiatan yang didanai adalah penyediaan air bersih dan jalan beton, jual-beli pupuk untuk petani dan program

kemudian diusulkan, pembangunan jembatan, yang dibayar Rp 100.000,00 per hari.

Aneka kendala masih menghadang, seperti dana yang masih kurang, distribusi dan pengiriman pupuk yang belum lancar, SDM yang masih terbatas dan kurang andal, baik dalam hal pembinaan, pelatihan sumberdaya manusia maupun penguatan organisasi. Dana desa yang dialokasikan khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1 sudah ada dalam bentuk program bantuan bagi anak yatim dan para orang tua manula atau jompo, dan padat karya tunai.

Masyarakat Sidang Muara Jaya berharap bahwa pemanfaatan dana desa perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya dan evaluasi perlu dilakukan terhadap hasil yang didapat, serta sosialisasi yang baik dari pemerintah untuk pemanfaatan dana desa yang akan datang. Masyarakat juga berharap, dana desa selanjutnya digunakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya dalam pengembangan dan beragam pelatihan untuk industri rumahan, seperti industri kerupuk udang dan ikan. Faktor peluang yang dapat menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan dana desa di Desa Sidang Muara Jaya, di antara adalah tersedianya bantuan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Kementerian ESDM RI, bantuan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dari Kementerian Perikanan dan kelautan RI, pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi untuk pembangunan, dan program pembangunan rumah nelayan dari DKP.

Faktor tantangan atau ancaman yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Sidang Muara Jaya, di antaranya: tidak menentunya musim ikan dan udang sebagai mata pencaharian utama; indikasi keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba; adanya indikasi pasokan senjata api dari luar; pencemaran air Sungai Mesuji oleh perusahaan perkebunan (PT. PNS, PT BWP, PT PA), konflik batas wilayah dengan Kabupaten Tulang Bawang (mencakup 720 ha lahan sawah).

Tabel 3.14.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Dana Desa Sidang Muara Jaya

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
- Sumber daya alam yang sangat melimpah di sektor perikanan (ikan dan udang).	- Potensi konflik antar-warga relatif tinggi tentang permasalahan lahan
- Bentang alam yang sangat indah, muara sungai dan pesisir yang masih terjaga	- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, terutama dari aspek pendidikan
- Lahan pertanian lebih dari 300 ha dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	- Jumlah warga putus sekolah dan menganggur cukup besar
- Jalur lalu lintas sungai para nelayan untuk menjual hasil (ikan dan udang) menuju pusat perekonomian di pasar Rawa Jitu Selatan.	- Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak
- Tersedianya sarana dan prasarana sosial seperti Pendidikan (PAUD, TK, SD dan TPA/TPQ), bangunan keagamaan (masjid dan musala), sarana kesehatan (puskesmas dan bidan).	- Terbatasnya energi listrik (PLN belum masuk desa Sidang Muara Jaya).
- Prasarana transportasi cukup memadai (jalan dan jembatan) kokoh terbuat dari beton.	- Jalan desa belum dibangun merata sampai dengan wilayah dusun dan RT

- Budaya gotong royong, bersatu dan kompak demi kepentingan bersama	- Sulitnya penyediaan air bersih yang layak pakai dan layak konsumsi
- Industri krupuk mencapai 300 KK	- Praktik perjudian masih cukup tinggi.
	- Terindikasi perilaku tingkat kriminalitas (narkoba, senjata api illegal) cukup tinggi

2.5.5. Desa Wira Bangun

Lembaga ekonomi yang dibentuk dari dana desa di Desa Wira Bangun adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes didirikan pada akhir tahun 2017. Kontribusi dana desa terhadap pengembangan lembaga ekonomi desa sudah berjalan. Program padat karya tunai sudah berjalan di Desa Wira Bangun. BUMDes di Desa Wira Bangun sudah berjalan melalui usaha bagi hasil kambing yang berjumlah 16 ekor dan sudah berjalan satu tahun terakhir. Bagi hasil baru dilaksanakan pada 5 (lima) anggota BUMDes dan masih terbatas bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan usaha bagi hasil. Kecamatan Simpang Pematang terdapat 13 (tigabelas) BUMDes, dengan 7 desa memiliki BUMDes yang aktif dan sisanya tidak aktif, termasuk yang tidak aktif adalah di Desa Wira Bangun.

Pemerintah Desa Wira Bangun melalui dana desa telah mengalokasikan bantuan modal kepada pengurus BUMDes untuk usaha ternak kambing dengan sistem bagi hasil sebesar Rp15- Rp20 juta, sedangkan untuk usaha Ibu-ibu PKK sebesar Rp5 juta.

Dana desa yang dialokasikan untuk lembaga ekonomi desa bermanfaat dalam mendorong keberhasilan lembaga

ekonomi desa serta dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menambah lapangan kerja di desa. Manfaat lain kegiatan yang didanai oleh dana desa lebih bersifat fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong untuk mempermudah akses jalan masyarakat.

Kontur tanah di Desa Wira Bangun yang didominasi tanah liat menyebabkan tanah sulit dilewati ketika hujan, sehingga pembangunan infrastruktur, terutama jalan di Desa Wira Bangun sangat diperlukan. Pembangunan di Desa Wira Bangun yang menggunakan dana desa berupa prasarana fisik sudah terealisasi, seperti pembangunan jalan di lingkungan desa (Dusun/RK), talut, gorong-gorong, dan drainase jalan, serta *jogging track* di lapangan Desa Wira Bangun. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Wira Bangun difokuskan pada aspek infrastruktur yang tidak hanya menysasar pada satu kelompok/golongan saja (pra-sejahtera dan sejahtera I), tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Pemanfaatan dana desa untuk usaha BUMDes di Desa Wira Bangun belum berhasil, karena masih belum aktif. Masih diperlukan bantuan yang tidak hanya pendanaan tetapi bantuan lain seperti pendampingan dan pelatihan pengurus BUMDes dan sumber daya manusia. Pengurus BUMDes tidak memahami bagaimana peran, fungsi, dan manajemen BUMDes. Komitmen pengurus BUMDes, usaha BUMDes di Desa Wira Bangun belum aktif karena banyak pengurus yang tidak memahami BUMDes sepenuhnya. Kendala lainnya berupa: sedikitnya pelatihan, perlunya pelatihan dan pendidikan terhadap pengurus BUMDes;

Pendampingan secara berkesinambungan perlu dilakukan terhadap BUMDes di Desa Wira Bangun; Kekompakan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes rendah; Penentuan jenis usaha prioritas belum dilakukan dengan baik di Desa Wira Bangun.

Usaha BUMDes hanya dibentuk sebagai kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang atas hak desa terkait dana desa, padahal BUMDes seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui usaha yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat, khususnya di Desa Wira Bangun

Belum ada dana desa yang dialokasikan khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1, karena dana desa yang disalurkan dirasa saat ini masih kurang dan hanya difokuskan untuk pembangunan fisik saja, seperti infrastruktur jalan. Penggunaan dana desa di Desa Wira Bangun saat ini masih terfokus untuk pengembangan infrastruktur desa, sementara kegiatan khusus untuk masyarakat pra-sejahtera menggunakan dana dari Pemkab Mesuji.

Harapan masyarakat, anggaran dana desa bisa dialokasikan secara khusus untuk masyarakat golongan pra-sejahtera dan sejahtera 1 agar masyarakat bisa merasakan manfaat lebih dari anggaran dana desa tersebut. Pembangunan desa masih sebatas di wilayah tertentu, dan banyak wilayah rukun keluarga yang belum tersentuh pembangunan, ini berkaitan dengan luasnya wilayah desa, sehingga perlu pemekaran desa.

Tabel 3.15.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Wira Bangun

NO	INDIKATOR	URAIAN
1.	Lembaga	- Terbentuknya BUMDes Desa Wira Bangun sejak akhir tahun 2017
2.	Kontribusi	- Cukup berperan untuk pembangunan Desa Wira Bangun
3.	Alokasi	- Usaha bagi hasil kambing yang berjumlah 16 ekor dan sudah berjalan satu tahun terakhir dengan dana Rp15-20 juta, sedangkan untuk usaha ibu-ibu PKK sebesar Rp5 juta.- Tidak ada dana alokasi khusus untuk keluarga pra-sejahtera dan sejahtera 1, dana diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa
4.	Kendala	- BUMDes Wira Bangun saat ini sudah tidak aktif - SDM untuk BUMDes dianggap kurang - Perlu bantuan pendanaan bagi BUMDes- Tidak ada pelatihan untuk pengurus dan anggota BUMDes- Tidak ada komitmen yang baik dari pengurus BUMDes dan anggota - Perlu pendampingan bagi keberlangsungan BUMDes- Partisipasi masyarakat masih dirasa kurang
5.	Manfaat	- Cukup bermanfaat
6.	Harapan	- Alokasi khusus untuk masyarakat pra-sejahtera dan sejahtera 1 - Pembangunan yang berasal dari dana desa baru dilakukan di wilayah tertentu, belum di semua wilayah Desa Wira Bangun

Faktor peluang yang dapat menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan dana desa di Desa Wira Bangun di antaranya adalah: tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang dialokasikan setiap tahun; tersedianya dana bantuan pembangunan setiap tahun anggaran dari beberapa kementerian (misal: Kemendesda dan PUPR), kebijakan pembangunan oleh pemerintah kabupaten relatif progresif; terdapat bantuan bagi

masyarakat miskin, baik dari pemerintah pusat dan daerah (Rastra dan Rastrada), program pendampingan pembangunan.

Tabel 3.16.
Faktor Pendorong dan Penghambat Desa Wira Bangun

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
- Akses transportasi cukup baik (berada di lintasan Jalan Lintas Sumatera dan Tol Sumatera)	- Tingkat inovasi dalam pembangunan yang rendah
- Jumlah populasi penduduk yang besar	- Menurunnya nilai kegotong-royongan dalam pembangunan desa
- Potensi (lahan dan komoditas) pertanian dan perkebunan	- Luas desa yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunan
- Fasilitas kesehatan relatif memadai	- Kohesi politik yang kurang kondusif
- Polres Mesuji berada di wilayah Desa Wira Bangun	- Kinerja kepemimpinan desa tidak optimal
- Potensi sumber daya air tanah cukup baik	- Kamtibmas kurang memuaskan
- Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif baik	
- Hubungan masyarakat antar-suku di wilayah desa cukup baik	
- Tersedianya jasa layanan perbankan yang cukup memadai	

Faktor tantangan atau ancaman yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Wira Bangun, di antaranya: potensi konflik antar-desa dan kabupaten yang tinggi; intensitas konflik kepemilikan tanah masih terjadi antara masyarakat desa dengan luar desa; harga komoditas perkebunan (karet dan sawit) yang tidak stabil; gangguan kamtibmas relatif tinggi; intervensi kebijakan dari pemerintah di atas desa; serta pencemaran sungai oleh perusahaan dari desa lain.

BAB IV

INOVASI DESA

4.1. Inovasi Desa Yang Dijalankan

4.1.1. Pemanfaatan Technoware

1. Desa Muara Tenang (Desa Maju)

Inovasi dalam pembangunan di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, meliputi percepatan pembangunan infrastruktur desa. Pertama, pembangunan jalan desa yang menjadi prioritas pembangunan desa. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses.

Kedua, selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah membangun gorong-gorong/jembatan, saluran drainase dan tembok penahan tanah (TPT). Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya untuk memelihara kualitas jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan yang tidak disertai pembangunan saluran drainase

dan TPT akan menyebabkan jalan lebih cepat rusak akibat terjangan air. Adanya program dana desa telah meningkatkan intensitas pembangunan infrastruktur desa. Dana desa memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.



Gambar 4.1
Pembangunan jalan dan gorong-gorong di Desa Muara Tenang

Ketiga, inovasi pembangunan lainnya yang dianggap perlu, yaitu membangun tribun lapangan olahraga dan ikon Desa Muara Tenang berupa tulisan Desa Muara Tenang. Inovasi pembangunan ini akan meningkatkan kegiatan kepemudaan yang ada di Desa Muara Tenang.



Gambar 4.2.
Pembangunan tribun dan ikon desa di Desa Muara Tenang

2. Desa Bangun Jaya (Desa Berkembang)

Inovasi pembangunan di Desa Bangun Jaya meliputi percepatan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan jalan desa, khususnya jalan, merupakan prioritas pembangunan. Jalan merupakan kebutuhan pokok untuk mempercepat pembangunan perekonomian desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya.

Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah gorong-gorong/jembatan dan saluran drainase. Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya untuk memelihara kualitas jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan yang tidak disertai pembangunan saluran drainase akan menyebabkan jalan cepat rusak akibat genangan air. Adanya program dana desa telah meningkatkan intensitas pembangunan

infrastruktur desa. Dana desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, sehingga masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani, yakni bekerja di perkebunan karet dan sawit lebih mudah mengeluarkan hasil panennya dan hasil bumi lainnya.



Gambar 4.3
Pembangunan Jalan Desa Bangun Jaya

3. Desa Wira Bangun (Desa Berkembang)

Inovasi dalam pembangunan di Desa Wira Bangun meliputi percepatan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan jalan desa merupakan prioritas pembangunan di Desa Wira Bangun. Jalan merupakan kebutuhan vital dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang

baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Selain jalan, bidang infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan adalah gorong-gorong/jembatan, saluran drainase dan tembok penahan tanggul (TPT). Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya untuk memelihara kualitas jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan yang tidak disertai pembangunan saluran drainase dan TPT akan menyebabkan jalan lebih cepat rusak akibat terjangan air. Jenis batu yang digunakan dalam pembangunan jalan di Desa Wira Bangun adalah batu sabes. Batu sabes dipilih untuk memperkuat jalan yang fondasi batunya telah ada. Adanya program dana desa telah meningkatkan intensitas pembangunan infrastruktur desa. Dana desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Selain dalam pembangunan, *technoware* di Desa Wira Bangun meliputi kelompok/tim tepat guna (TTG) dan produksi benih padi berkualitas dan telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi benih Provinsi Lampung.

Di Desa Wira Bangun terdapat kelompok pemuda/pemudi yang bergabung dalam tim Teknologi Tepat Guna (TTG). TTG adalah kelompok yang bekerja dan menciptakan sebuah inovasi dari bahan/benda tidak terpakai menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.



Gambar 4.4.
Pembangunan *jogging track* di lapangan Desa Wira Bangun



Gambar 4.5.
Sepeda statis karya tim Teknologi Tepat Guna Desa Wira Bangun dari limbah daur ulang



Gambar 4.6.
Benih Unggul Besertifikasi

Inovasi lain yang ada di Desa Wira Bangun adalah adanya benih padi sebar padi yang telah tesertifikasi dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Lampung. Benih padi sebar diproduksi

oleh Gapoktan Bangun Makmur yang diketuai oleh Bapak Bambang. Varietas benih padi yang diproduksi oleh Gapoktan Bangun Makmur adalah jenis Inpara 2 yang dapat menghasilkan produksi 7-8 ton/ha/musim tanam.

4. Desa Pangkal Mas Jaya (Desa Tertinggal)

Inovasi dalam pembangunan di Desa Pangkal Mas Jaya meliputi percepatan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan jalan desa merupakan prioritas pembangunan di desa ini. Jalan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Fasilitas jalan yang baik akan memudahkan akses masyarakat untuk mendukung perekonomian, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan efisiensi akses. Sebelumnya, kondisi jalan yang ada di Desa Pangkal Mas Jaya adalah tanah liat. Kondisi jalan akan semakin parah ketika musim hujan yang bahkan sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda dua. Saat ini pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan baru sebatas jalan penghubung antar-dusun (antar RK) dengan konstruksi rabat beton dan tanah merah.

Sama dengan prioritas pembangunan di desa-desa lainnya di sekitarnya, bidang infrastruktur menjadi prioritas pembangunan desa di Desa Pangkal Mas Jaya. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah jembatan, karena wilayah desa ini banyak dilewati kanal air pasang-surut Sungai Buaya. Kanal tersebut juga menjadi penghubung antara Sungai Buaya dan lahan sawah, yang juga berfungsi sebagai saluran irigasi.

Fasilitas jembatan tersebut sebelumnya terbuat dari batang pohon kelapa. Bahan dasar ini selain cepat rusak, juga sewaktu-waktu bisa roboh atau hanyut dibawa air sungai ketika musim penghujan.

5. Desa Sidang Muara Jaya (Desa Sangat Tertinggal)

Inovasi bidang *technoware* di Desa Sidang Muara Jaya meliputi pembangunan jembatan penghubung (melintasi kanal), pembangunan jalan beton, dan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI). Desa Sidang Muara Jaya merupakan pemekaran Desa Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara. Desa Sidang Muara Jaya berada di wilayah pesisir dan penduduknya didominasi nelayan.

Permasalahan utama yang dihadapi Desa Sidang Muara Jaya adalah keterbatasan akses jalan, air bersih, dan energi listrik. Akses jalan menjadi kendala terbesar yang dihadapi Desa Sidang Muara Jaya karena desa dikelilingi kanal selebar 10 sampai dengan 15 meter sehingga seluruh kegiatan penduduk Desa Sidang Muara Jaya dilakukan melalui kanal dengan kapal (Otok).

Sebelum adanya dana desa, jembatan penghubung kanal di Desa Sidang Muara Jaya telah rusak, sehingga masyarakat tidak dapat melintas. Program dana desa dimanfaatkan oleh Desa Sidang Muara Jaya untuk membangun jembatan penghubung pada tahun 2017.



Gambar 4.7.
Jembatan Penghubung di Desa Sidang Muara Jaya

Pembangunan jembatan telah membuka akses Desa Sidang Muara Jaya dalam berbagai kegiatan. Sebelum adanya jembatan, jual-beli kebutuhan pokok (termasuk air bersih) dilakukan melalui kanal. Pembangunan jembatan telah meningkatkan akses masyarakat dalam bidang perekonomian dan bidang lainnya sehingga lebih “menghidupkan” kembali Desa Sidang Muara Jaya.



Gambar 4.8.
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Sidang Muara Jaya

Inovasi bidang infrastruktur yang dikembangkan di Desa Sidang Muara Jaya adalah pembangunan jalan beton/cor pada jalan utama desa. Pembangunan jalan beton/cor disesuaikan dengan kondisi alam Desa Sidang Muara Jaya yang memiliki curah hujan tinggi serta intrusi air laut tinggi sehingga mempercepat kerusakan bangunan, termasuk jalan. Jalan beton dianggap cocok dengan karakteristik wilayah Desa Sidang Muara Jaya.

Sebagai wilayah pesisir yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, Desa Sidang Muara Jaya menghadapi masalah jual-beli hasil tangkapan ikan, terutama pada musim panen raya ikan. Kelimpahan hasil tangkapan nelayan dapat diatasi dengan adanya TPI yang menampung penjualan

tangkapan ikan masyarakat Desa Sidang Muara Jaya. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini sedang dibangun TPI di wilayah Desa Sidang Muara Jaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4.9.
Pembangunan Jalan Beton di Desa Desa Sidang Muara Jaya

4.1.2. Pemanfaatan *Humanware*

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Program dana desa menuntut kesiapan SDM dalam pembangunan. Salah satu inovasi SDM untuk mempercepat pembangunan di desa adalah adanya pembatasan usia bagi aparatur desa. Kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Bupati Mesuji yang menetapkan standar pendidikan dan batasan usia bagi aparatur desa (minimal lulusan SMA/ sederajat). Menurut instruksi Bupati Mesuji, usia aparatur pemerintahan desa maksimal 50 tahun ketika mulai menjabat. Adanya standar minimal pendidikan ini untuk memastikan bahwa SDM desa memiliki kualifikasi yang baik

dan memahami pembangunan desa yang bersifat cepat dan dinamis.

1. Desa Muara Tenang (Desa Maju)

Memang selain kualifikasi pendidikan, batasan usia juga penting untuk mempercepat pembangunan desa. Derap pembangunan di desa akan lebih cepat jika didukung oleh tenaga-tenaga muda dan yang lebih energik. Hal ini bukan berarti bahwa yang tua diabaikan, tetapi tetap penting diperhatikan untuk memberikan pemikiran dan dorongan moral.

Tabel 4.1.
Aparatur Pemerintahan Desa Muara Tenang

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	M. Khamdani	Kepala Desa	Laki-laki
2.	Johan Rifa'i	Ketua BPD	Laki-laki
3.	Susila	Sekretaris Desa	Laki-laki
4.	Riawati	Kasi Bendahara	Laki-laki
5.	Rahmad	Kasi Umum	Laki-laki
6.	Eko Sutiono	Kasi Pembangunan	Laki-laki
7.	M. Suyoto	Kasi Pemerintahan	Laki-laki
8.	Indra Yulawan	Kepala Dusun I	Laki-laki
9.	Kaniran	Kepala Dusun II	Laki-laki
10.	Andi Firmansyah	Kepala Dusun III	Laki-laki
11.	Nurhadi	Kepala Dusun VI	Laki-laki
12.	Supriyono	Kepala Dusun V	Laki-laki

Sebagian besar aparaturn pemerintah desa masih termasuk kategori tenaga muda. Dilihat dari usianya yang masih di bawah 50 tahun, mereka berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan desa didukung oleh para tokoh masyarakat lainnya.

2. Desa Bangun Jaya (Desa Berkembang)

Sumber daya manusia di Desa Bangun Jaya tidak jauh berbeda dengan yang ada di desa-desa lainnya. Kondisi sosiokultural dan pendidikan masyarakat di desa ini juga tidak tampak berbeda. Peluang dan kesempatan berinovasi untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat sebenarnya sudah terbuka, hanya saja masih banyak kendala. Pertama, kondisi jalan yang masih perlu diperbaiki; kedua, pendidikan keterampilan yang masih perlu ditambah; ketiga, kondisi sumberdaya lingkungan yang belum memungkinkan dapat dimanfaatkan secara optimal; keterbatasan dana untuk berinovasi; dan kondisi sosiokultural masyarakat setempat yang menjadi kendala kebebasan seseorang untuk maju, meskipun pada sisi lain bermanfaat dan perlu dipertahankan.

Tidak sedikit kenyataan di masyarakat desa bahwa gagasan-gagasan inovasi yang baik itu masih sulit dimunculkan sebagai suatu permasalahan bersama, menjadi kepentingan bersama, mendapat komitmen dan segera direalisasikan bersama.

Tabel 4.2.
Aparatur Pemerintahan Desa Bangun Jaya

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Fahrudin	Kepala Desa	Laki-laki
2	Budi Santoso, S.I.P	Sekretaris Desa	Laki-laki
3	Thomas Prasajo	Bendahara Desa	Laki-laki
4	Misyadi	Kasi Pelayanan	Laki-laki
5	Beni Prayogi	Kasi Pemerintahan	Laki-laki
6	Budiono	Kasi Kesejahteraan	Laki-laki
7	Suwandi	Kepala Dusun I	Laki-laki
8	Ismail	Kepala Dusun II	Laki-laki
9	Sunarto	Kepala Dusun III	Laki-laki
10	Agus Mulyanto	Kepala Dusun IV	Laki-laki
11	Uker Ismail	Kepala Dusun V	Laki-laki
12	Jafar Sodik	Kepala Dusun VI	Laki-laki
13	Slamet	Kepala Dusun VII	Laki-laki

Ketika inovasi itu berbasis kolektivitas, maka dukungan semua pihak sangat diperlukan. Selain itu, dukungan pemerintahan desa juga diperlukan, termasuk dukungan para pemimpin formal dan informal. Kendala sosiokultural untuk berinovasi itu bisa diatasi jika mau bergerak secara bersama-sama, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan bersama.

3. Desa Wira Bangun (Desa Berkembang)

Selain kualifikasi pendidikan, aparat desa di Kabupaten Mesuji, khususnya di Desa Wira Bangun, disyaratkan berusia

di bawah 45 tahun. Hal ini untuk mengantisipasi aparatur desa memiliki mobilitas yang tinggi sehingga harus diduduki oleh orang yang aktif dan jangkauannya luas. Wilayah desa yang luas dan jarak jangkau antara desa dengan kabupaten yang cukup jauh, dengan kondisi jalan yang belum bagus, diperlukan kondisi fisik yang memadai, dan ini bisa dilakukan lebih baik oleh para pemuda.

Data pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa sumber daya manusia di desa Wira Bangun, khususnya yang menjadi aparatur pemerintahan desa, sebagian besar masih muda. Dilihat dari segi usia yang sebagian besar masih muda ini, sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan pembangunan desa yang lebih kreatif dan inovatif.

Tabel 4.3.

Aparatur Pemerintahan Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang

No	Nama	Jabatan	J. Kelamin	Usia
1	Ari Sarjono	Kepala Desa	Laki-laki	26 tahun
2	Puji Rahayu, S.Fil., M.Pd	Sekretaris Desa	Perempuan	31 tahun
3	Yunis A	Bendahara Desa	Laki-laki	35 tahun
4	M. Daud Yusuf	Kasi Kesejahteraan	Laki-laki	40 tahun
5	Rindra S	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	28 tahun
6	Y. Adi W	Kasi Pelayanan	Laki-laki	50 tahun
7	Gideon	RK/Dusun 1	Laki-laki	50 tahun
8	Kormen	RK/Dusun 2	Laki-laki	40 tahun
9	Sutrisno	RK/Dusun 3	Laki-laki	30 tahun
10	Aris K	RK/Dusun 4	Laki-laki	38 tahun
11	Susanto	RK/Dusun 5	Laki-laki	38 tahun
12	Nurokhim	RK/Dusun 6	Laki-laki	50 tahun

Sama kondisinya dengan desa lainnya bahwa bagi masyarakat desa, faktor sosiokultural masih membuka ruang bagi warga masyarakat untuk secara kolektif berinovasi dan merealisasikannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dana desa masih dikonsentrasikan untuk membangun infrastruktur yang realitasnya sangat diperlukan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas yang lebih efektif dan efisien.

4. Desa Pangkal Mas Jaya (Desa Tertinggal)

Inovasi *humanware* di Desa Pangkal Mas Jaya erat kaitannya dengan imbauan Bupati Mesuji untuk mereformasi SDM pemerintahan desa. Instruksi Bupati Mesuji mensyaratkan aparat pemerintahan desa minimal harus lulusan SMA/ sederajat. Standar minimal pendidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa SDM desa memiliki kualifikasi yang memadai agar dapat memahami konsep dan pelaksanaan pembangunan desa yang cepat dan dinamis. Saat ini, perangkat Desa Pangkal Mas Jaya sudah diisi oleh perangkat usia produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa yang menuntut mobilitas tinggi. Daftar identitas dan jabatan perangkat Desa Pangkal Mas Jaya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program dana desa menuntut kesiapan SDM dalam pembangunan. Salah satu inovasi SDM untuk mempercepat pembangunan di Desa Sidang Muara Jaya adalah adanya pembatasan usia bagi aparatur desa. Kebijakan

tersebut sesuai dengan arahan Bupati Mesuji yang menetapkan batasan usia dan standar pendidikan bagi aparatur desa (minimal lulusan SMA/ sederajat). Menurut instruksi Bupati Mesuji, usia aparatur pemerintahan desa adalah 50 tahun ketika menjabat.

Tabel 4.4.
Perangkat Pemerintahan Desa Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur

No	Nama	Jabatan	J. Kelamin	Usia
1	Mahmudi, S.E.	Kepala Desa	Laki-laki	29 tahun
2	Slamet	Sekretaris Desa	Laki-laki	46 tahun
3	Priyo Yugo Purwoko	Bendahara Desa	Laki-laki	22 tahun
4	Joni Iskandar	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	23 tahun
5	Imam Mustofa	Kasi Pelayanan	Laki-laki	38 tahun
6	Sri Wulan	Kasi Pemberdayaan	Perempuan	23 tahun
7	Eman Sudrajat	RK/Dusun 1	Laki-laki	40 tahun
8	Rusli	RK/Dusun 2	Laki-laki	50 tahun
9	Maryono	RK/Dusun 3	Laki-laki	40 tahun

Realitasnya memang pemanfaatan dana desa untuk pembangunan bukan hanya karena faktor sumber daya manusia tetapi juga faktor sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu contoh adalah lahan sawah cukup luas yang dipisah oleh jalan utama, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang berbeda. Menurut masyarakat setempat, mereka sudah berusaha mengelolanya secara optimal “lebih baik” dari sawah sebelah, mulai dari pengolahan lahan dan pemupukan, tetapi hasil panennya tetap berbeda, yakni lebih rendah.

5. Desa Sidang Muara Jaya (Desa Sangat Tertinggal)

Sebagaimana yang dilakukan di desa-desa lainnya bahwa pada prinsipnya pemanfaatan sumber daya manusia dioptimalkan yang berpendidikan dan yang masih muda sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Mesuji. Namun demikian, sesuai dengan kondisi masyarakat desa di Indonesia pada umumnya bahwa hubungan afeksi masih kuat dibandingkan dengan hubungan fungsional.

Situasi pedesaan yang lebih banyak mengedepankan hubungan afeksi ini tidak dapat melepaskan pentingnya para tokoh masyarakat (informal) yang menjadi panutannya. Tokoh informal ini ada juga yang menduduki jabatan formal di masyarakat.

Tabel 4.5.
Perangkat Pemerintahan Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Benuang Alitopa	Kepala Desa	Laki-laki
2	Suherman	Sekretaris Desa	Laki-laki
3	Ahmad Nawawi	LPM	Laki-laki
4	Ridwan	KPMD	Laki-laki
5	Indra W.	Kasi Pemerintahan	Laki-laki
6	J. Malik	Kasi Umum	Laki-laki
7	M. Ali Sidin	Kaur Pembangunan	Laki-laki
8	Adepen	Pendahara	Laki-laki
9	Rempan	Kepala Dusun I	Laki-laki
10	Baharudin	Kepala Dusun II	Laki-laki

11	Erwansyah	Kepala Dusun III	Laki-laki
12	Alkab	Kepala Dusun IV	Laki-laki
13	R. Supangkat	Kepala Dusun V	Laki-laki

Konsentrasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan jalan dan jembatan desa memang memerlukan koordinasi yang baik. Memang, pembangunan seperti ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja, dan ketika sudah sampai pada pekerjaan beton jembatan atau rabat beton jalan, sedikit tenaga kerja pula yang diperlukan. Hanya saja sesuai dengan kebijakan Bupati Mesuji dan demi pemerataan, pembangunan itu harus melibatkan penduduk desa setempat.

4.1.3. Pemanfaatan *Infoware*

1. Desa Muara Tenang (Desa Maju)

Program dana desa telah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan multimedia dalam mendukung pembangunan di Desa Muara Tenang. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan. Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, aparat pemerintahan Desa Wira Bangun tergabung dalam sebuah grup *WhatsApp*. Adanya grup *WhatsApp* ini untuk mempercepat aliran informasi dan komunikasi antar-aparat desa. Dahulu komunikasi antar-aparat seringkali hanya dilakukan lewat tatap muka secara langsung, tetapi kemajuan teknologi menyebabkan

komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui media sosial sehingga mempercepat pengambilan keputusan.

Media sosial *facebook* juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi. Banyak aparat Desa Wira Bangun yang terhubung dengan Bupati Mesuji sehingga hal-hal yang berkaitan pembangunan dapat dibagi (*sharing*) dengan khalayak umum, khususnya pemerintah kabupaten. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi *siskudes*. Aplikasi *siskudes* dikelola oleh desa untuk semua hal yang berkaitan dengan dana desa, seperti pelaporan, monitoring, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi secara langsung meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di Desa Wira Bangun. Selain itu, inovasi baru di Desa Muara Tenang adalah adanya *wifi* internet di kantor Desa Muara Tenang. Adanya *wifi* internet di kantor Desa Muara Tenang akan memudahkan aparat desa untuk mengerjakan seluruh tugas dan administrasinya.

Desa Bangun Jaya (Desa Berkembang)

Program dana desa telah meningkatkan penggunaan teknologi dan multimedia dalam mendukung pembangunan di Desa Bangun Jaya. Dengan adanya program dana desa, jumlah komputer yang semula hanya ada 2 buah, meningkat menjadi 5 buah. Saat ini, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditambahkan 2 printer dan *wifi* di balai desa.

Pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan bagi semua pihak, termasuk pembangunan. Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, aparat pemerintahan

Desa Bangun Jaya tergabung dalam sebuah grup *WhatsApp*. Grup *WhatsApp* bertujuan untuk mempercepat komunikasi antar-aparat desa serta pelayanan desa. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi *siskudes*. Aplikasi *siskudes* dikelola oleh desa untuk semua hal yang berkaitan dengan dana desa, seperti pelaporan, monitoring, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi secara langsung meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di Desa Bangun Jaya.

3. Desa Wira Bangun (Desa Berkembang)

Program dana desa telah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan multimedia dalam mendukung pembangunan di Desa Wira Bangun. Sebelum adanya program dana desa, jumlah komputer yang ada di balai desa hanya 2 buah. Saat ini, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah komputer di Balai Desa Wira Bangun telah tersedia 6 buah komputer.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan. Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, aparat pemerintahan Desa Wira Bangun tergabung dalam sebuah grup *WhatsApp*. Adanya grup *WhatsApp* untuk mempercepat aliran informasi dan komunikasi antar-aparat desa. Dahulu komunikasi antar-aparat seringkali hanya dilakukan lewat tatap muka secara langsung, tetapi kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga mempercepat

pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bersama.

Media sosial *facebook* juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi. Banyak aparat Desa Wira Bangun yang terhubung dengan Bupati Mesuji sehingga hal-hal yang berkaitan pembangunan dapat dibagi dengan khalayak umum, khususnya pemerintah kabupaten. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi *siskudes*. Aplikasi *siskudes* dikelola oleh desa untuk semua hal yang berkaitan dengan dana desa, seperti pelaporan, monitoring, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi secara langsung meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di Desa Wira Bangun.

4. Desa Pangkal Mas Jaya

Program dana desa telah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan multimedia dalam mendukung pembangunan di Desa Pangkal Mas Jaya. Saat ini, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah komputer di Balai Desa Pangkal Mas Jaya sudah tersedia 2 unit komputer.

Pada tahun 2018, Desa Pangkal Mas Jaya juga mulai meningkatkan fasilitas internet dengan memasang jaringan internet di kantor desa. Dengan adanya internet desa, perangkat desa maupun warga dapat mengakses informasi digital lebih mudah dan cepat.

Media sosial *facebook* dan *WhatsApp* juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan informasi. Banyak aparat Desa

Pangkal Mas Jaya yang terhubung dengan Bupati Mesuji sehingga hal-hal yang berkaitan pembangunan dapat dibagi dengan khalayak umum, khususnya pemerintah kabupaten. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi *siskudes*. Aplikasi *siskudes* dikelola oleh desa untuk semua hal yang berkaitan dengan dana desa, seperti pelaporan, monitoring, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi secara langsung meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di Desa Pangkal Mas Jaya.

5. Desa Sidang Muara Jaya (Sangat Tertinggal)

Program dana desa telah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan multimedia dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan di Desa Sidang Muara Jaya. Program dana desa telah meningkatkan kuantitas fasilitas seperti tersedianya 2 unit komputer, 3 unit laptop, dan 2 unit mesin printer di balai desa. Fasilitas tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan di Desa Sidang Muara Jaya.

Keterbatasan jaringan komunikasi di Desa Sidang Muara Jaya merupakan hambatan dalam pembangunan karena sulitnya keluar-masuk informasi. Untuk mendukung kelancaran informasi dan pelaporan administrasi, aparat Desa Sidang Muara Jaya memasang *wifi* di balai desa. *Wi-fi* mendukung pelaporan pemanfaatan dana desa berbasis *online* melalui aplikasi *siskudes*. Aplikasi *siskudes* dikelola oleh desa untuk semua hal yang berkaitan dengan dana desa, seperti pelaporan, monitoring, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi

informasi secara langsung meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di Desa Sidang Muara Jaya.

4.1.4. Pemanfaatan *Orgaware*

1. Desa Muara Tenang (Desa Maju)

Program dana desa yang digulirkan pemerintah menyebabkan perubahan yang berarti terhadap pelayanan masyarakat desa. Sebelum adanya program dana desa, pelayanan terhadap masyarakat desa sering dilakukan di rumah aparatur desa. Sebagai konsekuensinya adalah kantor desa seringkali tidak buka. Adanya program dana desa menyebabkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kebutuhan lainnya. Kantor Desa Muara Tenang saat ini buka setiap hari kerja, dari Senin sampai Jumat.

Pada umumnya, pelayanan surat-menyurat dapat diselesaikan dalam satu hari. Peningkatan pelayanan desa kepada masyarakat erat kaitannya dengan adanya program dana desa yang di dalamnya mencakup pemberian insentif atau gaji bagi aparat desa. Kebijakan ini secara tidak langsung meningkatkan tanggung jawab aparat desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya dana desa, bahwa aparat desa tidak memperoleh insentif/gaji sehingga pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara individual di kediaman aparat desa.

2. Desa Bangun Jaya (Desa Berkembang)

Pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat difasilitasi dengan kantor balai desa yang direhab sehingga kondisinya cukup memadai. Kondisi gedung seperti ini ditambah dengan adanya insentif bulanan dari dana desa menambah semangat aparat desa untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa masih termasuk kategori standar, belum tampak adanya inovasi yang berarti.



Gambar 4.10.

Balai Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan operasional pustakawan dan posyandu, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam Posyandu dilaksanakan oleh Bidan dan Kader setiap 1 bulan sekali pada tanggal 15



Gambar 4.11.

Posyandu Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Di Desa Bangun Jaya belum ada upaya pengembangan program layanan kesehatan yang dilakukan lebih intensif terhadap balita dan lansia. Hal ini disebabkan selain kurang adanya dukungan dari warga masyarakat dan berbagai pihak lain terkait, juga keterbatasan tenaga medis dan dana yang tersedia.

3. Desa Wira Bangun (Desa Berkembang)

Program dana desa yang digulirkan pemerintah menyebabkan perubahan signifikan dalam organisasi pemerintahan desa, terutama pelayanan desa terhadap masyarakat. Sebelum adanya program dana desa, pelayanan terhadap masyarakat umumnya dilakukan di rumah aparatur desa. Hal ini disebabkan balai (kantor) desa seringkali tidak buka sehingga tidak dapat melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kantor desa. Adanya program dana desa

menyebabkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kebutuhan lainnya.

Kantor Balai Desa Wira Bangun saat ini buka setiap hari kerja, dari Senin sampai dengan Jumat. Umumnya, pelayanan surat-menyurat dapat diselesaikan dalam satu hari. Bukti perubahan pelayanan di Desa Wira Bangun adalah adanya seorang Kasi Pelayanan yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Kasi pelayanan dibentuk semenjak adanya program dana desa).



Gambar 4.12.
Kantor Balai Desa Wira Bangun

Peningkatan pelayanan desa kepada masyarakat erat kaitannya dengan adanya program dana desa yang di dalamnya mencakup pemberian insentif atau gaji bagi aparat desa.

Hal ini secara tidak langsung meningkatkan tanggung jawab aparat desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan sebelum adanya dana desa, aparat desa tidak memperoleh insentif/gaji sehingga pelayanan dilakukan secara individu di rumah aparat desa. Hanya kondisi darurat layanan kepada masyarakat dapat dilayani di rumah aparat desa. Adanya program dana desa telah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Desa Wira Bangun.

4. Desa Pangkal Mas Jaya (Desa Tertinggal)

Program dana desa yang digulirkan pemerintah untuk pembangunan desa dimanfaatkan oleh Desa Pangkal Mas Jaya untuk meningkatkan kualitas organisasi pemerintahan desa. Salah satunya adalah memberikan insentif bagi perangkat desa. Pemberian insentif diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi Desa Pangkal Mas Jaya. Salah satu bentuk upaya perbaikan organisasi pemerintahan desa adalah melalui pelatihan-pelatihan perangkat desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Selain pelatihan yang diberikan untuk perangkat desa, dana desa juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan posyandu. Dengan bergulirnya dana desa, Desa Pangkal Mas Jaya memiliki gedung posyandu dan 10 kader saat ini. Posyandu di Desa Pangkal Mas Jaya secara rutin melakukan kegiatan yang difokuskan untuk balita dan lansia. Kegiatan tersebut berupa cek kesehatan gratis dan kegiatan sarapan untuk balita yang diadakan setiap bulan.



Gambar 4.13
Kantor Desa Pangkal Mas Jaya

5. Desa Sidang Muara Jaya (Desa Sangat Tertinggal)

Program dana desa memberikan dampak signifikan dalam pelayanan desa. Sebelum adanya program dana desa, pelayanan masyarakat di Desa Sidang Muara Jaya dilakukan di rumah aparat desa. Program dana desa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat meskipun masih dilakukan di rumah kepala desa. Umumnya, pelayanan surat-menyurat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, karena aparat pemerintah desa selalu siap di kantor untuk menerima pelayanan pada hari-hari kerja.



Gambar 4.14.
Kantor Desa Sidang Muara Jaya (menggunakan rumah Kepala Desa)

Peningkatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat juga erat hubungannya dengan dana desa, karena dengan adanya dana itu, dapat diberikan insentif atau gaji bagi aparatur desa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada aparatur desa dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

4.2. Kebutuhan Inovasi Desa Lebih Lanjut

Inovasi sebagai suatu terobosan yang bersifat baru bagi kelompok masyarakat sangat dibutuhkan demi pencapaian tujuan pembangunan suatu desa. Inovasi yang diterapkan di

suatu desa umumnya bersifat spesifik, hal ini menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah.

4.2.1. Desa Muara Tenang (Desa Maju)

Penggalian data primer dan sekunder di Desa Muara Tenang menghasilkan suatu gambaran tersendiri. Masyarakat memaknai inovasi sebagai sebuah upaya yang sudah dilakukan dalam penggunaan dana desa. Mereka tidak memaknai inovasi sebagai upaya terobosan yang dihasilkan atau karya baru yang dihasilkan sebagai sebuah proses dan upaya pencarian atas penanggulangan masalah atau solusi cerdas yang belum digunakan oleh banyak pihak lain.

Inovasi yang sudah diimplementasikan di Desa Muara Tenang saat ini adalah, pertama, pembuatan ikon desa sebagai sarana untuk pemuda berkumpul. Kedua, adanya *wifi* atau jaringan internet gratis di kantor desa sehingga memudahkan aparat desa dalam mengakses internet. Ketiga, adanya tribun di lapangan desa sehingga dapat mendorong pemuda lebih aktif untuk melakukan kegiatan olahraga. Selain itu, juga direncanakan akan dibuat kerajinan dari warga masyarakat desa setempat.

Tujuan melakukan inovasi desa adalah dapat menyejahterakan masyarakat. Proses inovasi yang sudah dilakukan tetap mengedepankan prinsip gotong-royong. Penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam penerapan inovasi sudah cukup baik. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaan inovasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah faktor alam yang dianggap dapat memperlambat proses kegiatan inovasi tersebut.

Hasil inovasi itu juga berpengaruh terhadap peningkatan status desa dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang bisa membantu meningkatkan status desa antara lain, adanya kegiatan pengembangan infrastruktur seperti pengerasan jalan dan pembangunan jalan desa dalam bentuk rambat beton. Kondisi ini sangat membantu memudahkan akses mobilitas dan menggiatkan usaha ekonomi warga desa, sehingga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keunggulan dari inovasi yang dilakukan dalam hal keramahan lingkungan tidak ditemukan. Keunggulan dari inovasi yang dilakukan dalam hal penerapan oleh masyarakat berupa kegiatan yang menjadi skala prioritas di bidang kesehatan, seperti pengembangan fasilitas kesehatan posyandu, peningkatan kualitas kader posyandu, dan dari sisi pemberdayaan berupa pelatihan sistem keuangan desa dan pelatihan BUMDes. Terakhir adalah keunggulan inovasi yang dilakukan dalam hal kemudahan, efisiensi biaya, waktu, dan tenaga kerja. Inovasi *wifi* ini mudah karena bersifat fisik yang tidak terlalu besar. Untuk membuat ikon desa dan tribun di lapangan memang memerlukan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit, tetapi saat ini masyarakat bisa menikmati dengan gratis tanpa dipungut biaya.

4.2.2. Desa Bangun Jaya (Desa Berkembang)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Bangun Jaya, responden yang diwawancarai memaknai inovasi sebagai sebuah upaya yang sudah dilakukan dalam penggunaan dana desa. Informan tidak memaknai inovasi sebagai upaya terobosan yang sudah dihasilkan atau karya baru yang dihasilkan sebagai sebuah proses dan upaya pencarian atas penanggulangan masalah atau solusi cerdas yang belum digunakan oleh banyak pihak.

Inovasi yang sudah diimplementasikan menurut informan dalam penelitian ini adalah pembangunan dan pelebaran jalan desa, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, serta pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih. Tujuan melakukan inovasi desa menurut informan adalah membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan kebutuhan dari masyarakat dalam penyediaan air bersih.

Sebagaimana yang telah dilakukan di desa-desa lainnya, bahwa inovasi yang sudah diimplementasikan adalah pembangunan jalan desa. Sebelum pembangunan jalan terlebih dahulu dilakukan pembukaan dan pembebasan lahan. Sedangkan untuk penyediaan air bersih, dilakukan dengan membuat sumur bor bagi RK yang membutuhkan. Untuk pembangunan jalan desa antar-RK dan desa, kondisi jalan yang sempit harus dibuka dulu atau dilebarkan. Akseptabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penerapan inovasi sudah cukup sesuai dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

sudah cukup baik, karena ada beberapa pekerja dari warga masyarakat desa itu sendiri.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi adalah perizinan pembebasan lahan perkebunan milik beberapa warga. Pada tahun 2018, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah adanya aturan atau Peraturan Menteri Desa mengenai alokasi dana desa yang terbentur dengan RPJM Desa, sehingga pembangunan tidak boleh terfokus pada satu bidang saja.

Hasil inovasi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status desa dan kesejahteraan masyarakat masih belum begitu tampak dalam beberapa tahun ini. Pembangunan yang dilakukan belum selesai semua, meskipun masyarakat saat ini sudah bisa merasakan manfaatnya, walaupun masih belum banyak. Pengerasan dan pelebaran jalan desa sangat terasa manfaatnya, terutama memudahkan warga untuk melakukan mobilitas dan mengeluarkan hasil bumi untuk didistribusikan.

Keunggulan dari inovasi yang dilakukan dalam hal keramahan lingkungan menurut penilaian masyarakat adalah, polusi udara mulai berkurang dan sumber air bersih mudah dijangkau. Keunggulan dari inovasi yang dilakukan dalam hal penerapan oleh masyarakat, adalah dengan terbangunnya jalan desa yang memadai dapat berperan sebagai sarana transportasi yang memudahkan warga melakukan mobilitas dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan memenuhi berbagai kepentingan.

Akses berupa jalan yang memadai merupakan keunggulan dari inovasi dalam hal kemudahan, efisiensi biaya, waktu, dan tenaga kerja, sehingga warga menjadi tidak sulit dalam melakukan mobilitas, jangkauan terhadap sumber air menjadi tidak jauh, dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Selain itu, akses jalan turut melancarkan usaha sehingga alokasi biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan hasil tani dapat diminimalkan.

4.2.3. Desa Wira Bangun (Desa Berkembang)

Berdasarkan hasil olah data wawancara dan data sekunder serta analisis data primer di lapangan didapatkan hasil bahwa belum ada inovasi yang dilakukan di Desa Wira Bangun. Salah satu faktor penyebabnya adalah pergantian Kepala Desa yang baru berjalan satu tahun sehingga membutuhkan adaptasi terkait inovasi dalam pembangunan.

Inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan status desa melalui pemerintahan desa adalah dengan menata aparat pemerintahan desa yang masih berusia muda. Mereka diharapkan dapat lebih cepat bergerak dan juga lebih cepat dan lebih baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi di bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga diperlukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa. Artinya, melalui teknologi elektronik tersebut maka kinerja layanan pemerintah desa dapat ditingkatkan.

Seperti yang dilakukan di desa-desa lainnya, bahwa inovasi yang sudah dilakukan adalah prioritas pada pembangunan jalan permanen, drainase jalan, dan jembatan/gorong-gorong. Pembangunan yang diusulkan adalah pembangunan SMP di Desa Wira Bangun karena banyaknya jumlah siswa SD yang berasal dari Desa Wira Bangun dan harus sekolah di luar desa.



Gambar 4.15.

Contoh Pembangunan Jalan Desa dengan Rambat Beton

Pemberdayaan masyarakat yang dapat diandalkan adalah mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar melalui kolam, tetapi komitmen warga masyarakat masih rendah. Selain pengetahuannya yang masih rendah, juga membutuhkan contoh nyata keberhasilan yang sudah dilakukan oleh warga. Oleh karena itu, usaha ini memerlukan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Tanpa dilakukan pendampingan, usaha di bidang ini akan gagal. Pendampingan dan pelatihan pengurus BUMDes juga perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap mental para pengurusnya.

Perencanaan Desa Wira Bangun lainnya dalam meningkatkan ekonomi warga masyarakat adalah gagasan membuat sentra oleh-oleh kuliner Kabupaten Mesuji, yakni kuliner mi ikan. Selain itu juga direncanakan akan dibangun wisata Pantai Donok yang potensial menarik pada wisatawan domestik. Semua ini akan dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mennggerakkan perekonomian masyarakat di Desa Wira Bangun.

Masyarakat berharap agar ide-ide tersebut segera direalisasikan karena saat ini harga getah karet sangat murah, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Gagasan lainnya adalah pendirian koperasi khusus bagi masyarakat Desa Wira Bangun yang menyediakan sarana produksi dan alat pertanian sehingga memudahkan petani memperoleh sarana dan bahan untuk usaha pertanian mereka.

4.2.4. Desa Pangkal Mas Jaya (Desa Tertinggal)

Berdasarkan olah data di lapangan di Desa Pangkal Mas Jaya, belum terdapat inovasi yang sudah diimplementasikan, tidak terdapat tujuan melakukan inovasi desa, tidak ada proses inovasi yang sudah diimplementasikan. Akseptabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penerapan inovasi tidak ada. Kendala dan tantangan yang dihadapi terkait inovasi disebabkan tiadanya kemauan, SDM dan keinginan dari masyarakat desa. Tidak terdapat hasil inovasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan status desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

4.2.5. Desa Sidang Muara Jaya (Desa Sangat Tertinggal)

Inovasi yang telah dilaksanakan di Desa Sidang Muara Jaya meliputi pembangunan jembatan penghubung desa yang melintasi kanal, pembangunan jalan cor/beton, pembangunan balai desa, pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), pemasangan *wifi* di Balai Desa Sidang Muara Jaya, penggunaan *solar cell* sebagai sumber energi pengganti listrik, pembangunan sumur bor melalui Program PAMSIMAS, dan meningkatkan pelayanan administrasi desa bagi masyarakat. Semua inovasi tersebut dilakukan dengan tujuan mempercepat kemajuan Desa Sidang Muara Jaya yang masih berstatus sebagai desa yang sangat tertinggal.

Inovasi yang telah dilakukan di Desa Sidang Muara Jaya umumnya bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat. Masyarakat Desa Sidang Muara Jaya memiliki modal sosial tinggi dalam gotong royong dalam pembangunan, terutama dalam pembersihan kanal. Gotong-royong pembersihan kanal dilakukan 2 kali dalam seminggu yang dipimpin oleh kepala desa.

Tidak semua inovasi yang dikembangkan oleh Desa Sidang Muara Jaya berjalan dengan baik. Beberapa inovasi mengalami kendala dalam implementasi dan pemeliharaan, bahkan terdapat beberapa inovasi yang mengalami kegagalan. Inovasi yang mengalami kegagalan di antaranya adalah program PAMSIMAS yang dibangun di tiga lokasi di Desa

Sidang Muara Jaya. Program PAMSIMAS dibangun pada tahun 2016 dan saat ini tidak dimanfaatkan karena jenis air di Desa Sidang Muara Jaya keruh dan tidak bisa dimanfaatkan. Selain jenis air, ketersediaan listrik menjadi kendala utama untuk menghidupkan mesin pompa air. Desa Sidang Muara Jaya belum teraliri listrik. Masyarakat sering menggunakan diesel untuk penerangan. Ketidakterediaan listrik di Desa Sidang Muara Jaya menyebabkan adanya inovasi *solar cell*. Inovasi pemanfaatan *solar cell* juga menemui beberapa hambatan, yaitu beberapa unit *solar cell* dicuri orang yang tidak bertanggung jawab.

Inovasi lainnya yang bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sidang Muara Jaya adalah pembangunan jembatan penghubung yang melintasi kanal sejauh 15 meter. Sebelum dibangun dengan dana desa, jembatan yang ada berupa jembatan kayu yang sudah roboh sehingga masyarakat tidak dapat keluar-masuk menggunakan jalur darat. Semua kegiatan dilakukan melalui kanal, termasuk jual-beli air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Selain itu, program dana desa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan jalan beton yang lebih kuat di wilayah dengan karakteristik pesisir seperti Desa Sidang Muara Jaya.

Meskipun demikian, inovasi yang ada sekarang masih belum mampu memperbaiki status Desa Sidang Muara Jaya dari Desa Sangat Tertinggal ke desa yang lebih baik statusnya. Hal ini disebabkan kondisi desa yang memiliki banyak keterbatasan di berbagai sektor, seperti air bersih, telekomunikasi, listrik,

SDM, akses jalan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Banyaknya hambatan dan permasalahan pembangunan yang dialami, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki, maka diperlukan upaya yang serius mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yang mampu memutus keterbatasan dan ketertinggalan Desa Sidang Muara Jaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat perkembangan status desa pada desa-desa di Kabupaten Mesuji, sebagian besar masih termasuk kategori statis. Status desa berkembang, maju, dan mandiri mengalami peningkatan jumlah dalam empat tahun terakhir (2015-2018), tetapi masih terkonsentrasi pada desa berkembang, dan belum ada desa mandiri.
2. Dinamika perkembangan status desa berdasarkan dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah erat kaitannya dengan banyaknya program pembangunan yang masuk ke desa, di antaranya program dana desa.
3. Dalam empat tahun terakhir, dana desa masih difokuskan pada pembangunan sarana dan infrastruktur desa, terutama jalan dan jembatan. Bidang pemberdayaan masyarakat desa menjadi skala prioritas kedua. Tetapi, dampaknya bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masih belum berarti, karena tidak bisa secara cepat dilihat dalam jangka pendek.

4. Pembangunan prasarana fisik (seperti jalan desa dengan sistem rambat beton) dianggap sebagai program inovasi karena sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Inovasi lainnya adalah pengembangan BUMDes dalam bentuk peternakan, usaha saprotan, dan usaha lain masih belum berhasil karena faktor kualitas SDM dan penguasaan teknologi yang perlu sosialisasi dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan.

5.2.Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kembali program KKN Tematik yang pernah dilakukan Universitas Lampung (Unila) pada tahun 2012, khususnya di Kabupaten Mesuji.
2. Pendampingan dan penguatan kapasitas pengelola BUMDes (selama ini Universitas Lampung sudah melakukannya di Kabupaten Pesisir Barat).
3. Mendiseminasikan (menyebarkan) hasil-hasil penelitian yang aplikatif oleh para dosen, terutama di desa-desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, Khuswatun., Rosyadi, Slamet., dan Kurniasih, Denok. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol 3 (2): 12-31. Downloaded from: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Nasar, M. 2016. Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016 hlm 56-63.
- Wahab, Oki Hajiansyah. 2013. Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1 (1): 15-31.

MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG

Perubahan positif suatu desa sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan dilaksanakan dan penunjang yang diperlukan terpenuhi untuk membangun desa. Program dan kegiatan harus disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, diperlukan dana, antara lain dalam bentuk Dana Desa.

Dimulai tahun 2015, setiap tahun pemerintah telah memberikan Dana Desa kepada setiap desa di Indonesia, termasuk semua desa di wilayah Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan data dan informasi yang rinci terhadap manfaat alokasi Dana Desa yang sudah diberikan, perlu dilakukan kegiatan penyusunan data dan informasi tentang manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung.

Laporan akhir dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Lampung ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data survei dan wawancara mendalam yang didukung oleh data dokumen. Data dikumpulkan dari lima desa contoh, pada empat kecamatan di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Data primer dan sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan dianalisis berdasarkan sajian data tersebut

ISBN 978-623-7129-39-4



9 786237 129394